

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG (PUPR) DALAM PERBAIKAN DRAINASE DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

PUTRI SALMEDI
NPM : 167310028

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Putri Salmedi
NPM : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

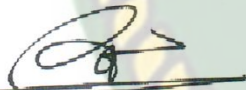
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Putri Salmedi
NPM : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

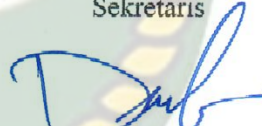
Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

Sekretaris



Dita Fisdian Adni S.IP., M.IP

Anggota



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

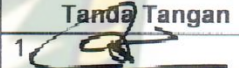
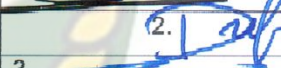

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

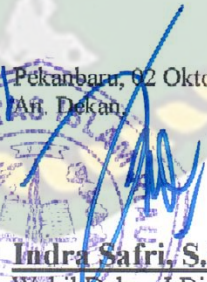
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 918/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 01 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 02 Oktober 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Putri Salmedi
NPM : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Perbaikan Drainase di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 81.43 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 02 Oktober 2020
Art. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 918/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Salmedi
N P M : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Perbaikan Drainase di Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

1. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
Dekan,
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Salmedi
NPM : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

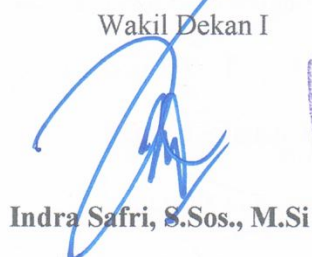


Dita Fisdian Adni S.IP., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh untuk meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul : **“Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya dilakukan dengan segala usaha yang dilakukan penulis untuk melengkapi penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan semangat yang penulis terima baik berupa moril, spriritual, maupun materi dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan ketulusan hati dan kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang turut membantu dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
6. Secara khusus penulis persembahkan terutama untuk ayah dan ibu tersayang, abang, adik-adik, serta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang, selalu memberikan nasihat, dorongan, dukungan, bantuan baik moril maupun materil serta doa restu yang tak ternilai harganya kepada penulis.
7. Kepada seluruh sahabat dan Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

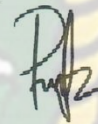
Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak, dari Bapak/ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Penulis



Putri Salmedi



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTACT.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	26
2. Kegunaan Penelitian.....	26
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Pemerintahan.....	28

2. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	31
3. Konsep Otonomi Daerah.....	36
4. Tugas Pemerintahan.....	38
5. Fungsi-Fungsi Pemerintahan.....	40
6. Konsep Kebijakan.....	41
7. Konsep Evaluasi.....	43
8. Konsep Perbaikan.....	47
9. Konsep Drainase.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Konsep Operasional.....	52
E. Operasional Variabel.....	54
F. Teknik Pengukuran.....	55

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Populasi Dan Sampel.....	62
D. Teknik Penarikan Sampel.....	64
E. Jenis Dan Sumber Data.....	65
F. Teknik Pengumpulan Data.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	67
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	67

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	
1. Keadann Geografis Umum Kota Pekanbaru.....	68
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	69
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	
1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Kota Pekanbaru	75
2. Falsafah Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru	76
3. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	76

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	
1. Jenis Kelamin Responden	79
2. Umur Responden.....	80
3. Pendidikan Responden.....	82
B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	
1. Indikator Efektivitas.....	85
2. Indikator Efisiensi	89
3. Indikator Kecukupan.....	92
4. Indikator Perataan	98
5. Indikator Responsivitas`	105
6. Indikator Ketepatan.....	110
C. Faktor-Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.....	124

BAB V: Penutup

A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Drainase	6
Tabel I.II	Kriteria Parameter Genangan	14
Tabel I.III	Daftar Genangan Air Di Kota Pekanbaru Tahun 2019	15
Tabel II.I	Kriteria-Kriteria Evaluasi Yang Dilengkapi Dengan Ilustrasi Menurut Dun	47
Tabel II.II	Penelitian Terdahulu Mengenai Penelitian Yang Terkait Dalam Judul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	50
Tabel II.III	Operasional Variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	54
Tabel III.I	Tabel Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	64
Tabel III.II	Perincian Jadwal Dan Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.....	67
Tabel IV.I	Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru/Kecamatan	72
Tabel IV.II	Daftar Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin/Kecamatan	73
Tabel IV.III	Jumlah Daftar Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru	74
Tabel V.I	Jenis Kelamin Responden Dinas Pekerjan Umum Dan Pentaan Ruang Kota Pekanbaru	80
Tabel V.II	Jenis Kelamin Responden Masyarakat.....	80

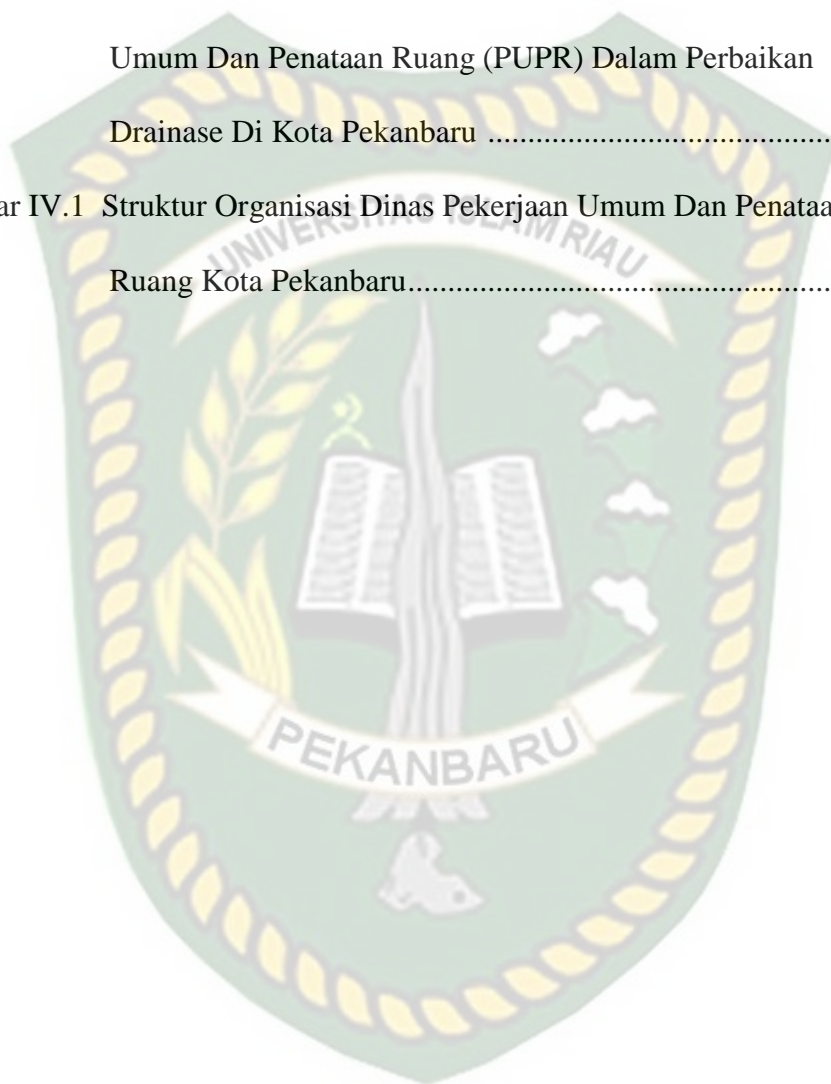
Tabel V.III	Tingkatan Umur Responden Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	81
Tabel V.IV	Tingkatan Umur Masyarakat.....	82
Tabel V.V	Tingkatan Pendidikan Responden Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	83
Tabel V.VI	Tingkatan Pendidikan Responden Masyarakat	83
Tabel V.VII	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efektivitas	85
Tabel V.VIII	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efisiensi.....	90
Tabel V.IX	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Kecukupan.....	93
Tabel V.X	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan.....	96
Tabel V.XI	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Perataan.....	99
Tabel V.XII	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Mengenai Indikator Perataan.....	103
Tabel V.XIII	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Responsivitas.....	105
Tabel V.XIV	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas.....	108
Tabel V.XV	Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Ketepatan.....	110
Tabel X.VI	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan.....	114

Tabel X.VII	Rekapitulasi Responen Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dari Hasil Penelitian Berjudul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	116
Tabel X.VIII	Rekapitulasi Responden Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru Dari Hasil Penelitian Berjudul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Kerangka Pikiran Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru	51
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 kuisisioner	133
Lampiran 2 kuisisioner	141
Lampiran 3 Wawancara	149
Lampiran 4 Data Telly	150
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	152
Lampiran 6 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor: 148/UIR-Fs/Kpts/2019	159
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34129	160
Lampiran 8 Surat Keterangan Nomor 722/DPU-PR/SEKRE/VII/2020 Telah Melaksanakan Izin Riset Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	161

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Salmedi
NPM : 167310028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Pelaku Pernyataan,



Putri Salmedi

EVALUASI TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DALAM PERBAIKAN DRAINASE DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

OLEH:
PUTRI SALMEDI

Drainase sebagai bangunan pelengkap jalan seperti saluran tepi jalan sebagai drainase permukaan untuk menampung dan mengalirkan air ketika hujan deras tiba yang cukup lama. Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam masalah drainase yang merupakan salah satu penyebab timbul adanya genangan atau banjir untuk itu perlu penanganan dalam mengatasinya agar tidak terjadi genangan yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam perbaikan drainase, dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, Sampelnya yaitu berjumlah Tiga Puluh Satu, Kepala Seksi Bina Marga, pegawai 10 orang yaitu pegawai Bidang Bina Marga berjumlah 7 orang dan Pegawai Sumber Daya Air berjumlah 3 orang. Adapun teknik yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga, untuk pegawai Dinas tersebut menggunakan teknik purposive sampling, dan untuk masyarakat menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisa data digunakan dengan hasil observasi, kuisisioner, wawancara, dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam kategori Cukup Baik, dengan persentase responden Dinas dengan persentase responden Dinas 51% sedangkan untuk responden masyarakat dengan persentase 60%. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam upaya penanganan agar drainase yang ada tidak tersumbat.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas

DUTY EVALUATION OF PUBLIC WORKS AND ADMINISTRATION SPACE (PUPR) IN DRAINAGE IMPROVEMENT IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

BY:
PUTRI SALMEDI

Drainage as a complement to road structures such as roadside drains as surface drainage to accommodate and drain water when heavy rains arrive for a long time. The existence of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office as an implementing element assists the mayor in carrying out government affairs in the field of Public Works and Spatial Planning led by the Head of the Service, in terms of drainage which is one of the causes of inundation or flooding for that it needs handling in overcoming it so that there is no excessive puddle. The purpose of this study is to determine the duties of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Agency in improving drainage, and to find out what are the inhibiting factors that are the obstacles to the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office. The method used is quantitative method, the sample is thirty one, the Head of the Highways Section, 10 employees, namely 7 employees of the Highways Division and 3 of Water Resources Employees. The technique used in determining individual samples is the census technique for the Head of the Highways Planning Section, for the Office employees using the purposive sampling technique, and for the community using the accidental sampling technique. Data analysis techniques are used with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation which are then processed and analyzed to explain the research objectives, it can be concluded that the duties of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Service are in the Fairly Good category, with the percentage of Service respondents and the percentage of respondents. Dinas 51% while for community respondents the percentage is 60%. This can be seen from the implementation of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Agency in an effort to prevent clogged drainage.

Keywords: Evaluation, Task

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Didalam suatu negara ini memiliki unsur diantaranya terdapat wilayah dan ada rakyat atau penduduknya yang tersebar diseluruh nusantara yang memiliki keberagaman dalam berbudaya dan beragama namun menjadi pemersatu kebhinekaan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika serta adanya pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk memudahkannya maka dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 1 sejalan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait pembagian wilayah Negara pada pasal 2 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan umum ini diperlukan bagi masyarakat agar kehidupan masyarakat itu menjadi sejahtera dan makmur. Kesejahteraan umum tersebut sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang pertama kalinya dibentuk adalah pemerintahan nasional kemudian membentuk daerah, pemerintahan nasional ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus bangsa Indonesia yang tugasnya terdapat pada alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah kemerdekaan tersebut dalam undang-undang dasar tahun 1945 merupakan dasar peraturan daerah yang terkandung didalamnya dalam penyelenggaraan negara yang dapat mendorong perkembangan dan kepentingan masyarakatnya diberbagai aspek sesuai dinamika dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakatnya berlandaskan hukum.

Untuk itu dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia maka dibentuklah pemerintahan Dan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia maka dibentuklah pemerintahan Indonesia dalam 2 (dua) bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Maksud dibentuknya pemerintahan itu sendiri yaitu sebagai pelaksanaan untuk

terwujudnya tujuan Negara Indonesia yang diarahkan untuk mampu mengelola negara ini agar mempercepat dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, dalam hal ini daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi kepada daerah otonom yang diberikan kewenangan dan kesempatan pada daerah yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerahnya untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 5 terdapat urusan pemerintahan yang dalam urusan pemerintahan wilayah pusat yang menjadi kewenangannya adalah Presiden yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini pada pasal 9 menyebutkan terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Untuk urusan pemerintahan absolut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, yang dalam menyelenggarakannya pemerintahan absolut dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat atau dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian untuk Urusan Pemerintahan Konkuren pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 11 bahwa urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 2 (dua) Urusan Pemerintahan yaitu urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib diselenggarakan oleh semua daerah . Urusan pemerintahan wajib itu terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang substansinya sesuatu pelayanan publik yang wajib dalam

memenuhi kebutuhan dalam pelayanan dasar warga negaranya yaitu meliputi :

- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. **Pekerjaan umum dan penataan ruang;**
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ini meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistic; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
 3. Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: kelautan, dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang diatas yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Wajib yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang salah satunya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dalam substansi urusan pemerintahan tersebut terdapat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, hal ini untuk mempermudah dalam manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak dapat dipisahkan dan sudah dinyatakan menjadi kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu salah satunya Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu salah satunya adalah sub urusan drainase, yang dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait sub urusan drainase adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Drainase

Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Drainase	a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang

	b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional	yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota	terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
--	---	--	--

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada pemerintahan pusat atau wilayah tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dipimpin oleh menteri, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dibantu oleh Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah tersebut disebutkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah ini pada pasal 209 terkait perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi meliputi:

- a. Sekretariat daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas.
- e. Badan.

Kemudian perangkat daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Sekretariat daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas.
- e. Badan.
- f. Kecamatan.

Berdasarkan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah itu dibantu oleh perangkat daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang salah satu sebagai unsur pembantunya adalah Dinas. Dinas daerah memiliki tugas sebagai pelaksana tugas pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai peraturan daerah yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab untuk membantu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut.

Seperti halnya untuk Dinas daerah tingkat kota terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana untuk membantu walikota dalam menjalankan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh kepala dinas. Hal ini

diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bahwa: Dalam kedudukannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Yang dalam kedudukannya terdapat :

1. Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota.
2. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
5. Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
6. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dalam Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 3. Seksi Operasi Dan pemeliharaan Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
 2. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan.
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
 3. Seksi Penataan Bangunan.
6. Bidang Jasa Kontruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
7. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bidang Pertamanan dan Ornamen.
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen.
 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 3. Seksi Pemeliharaan dan pertamanan.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya terdapat Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu kepala daerahnya yaitu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan pentataan ruang serta tugas pembantuan lainnya. Dan Fungsinya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan tata ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kota Pekanbaru ini sebagai ibukota Provinsi Riau, dengan wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km², kemudian hari jadinya Kota Pekanbaru tanggal 23 Juni 1784. Saat ini kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru berjumlah 12 kecamatan dengan jumlah kelurahan berjumlah 83 Kelurahan. Pekanbaru ini memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah perlintasan jalur darat yang sangat strategis untuk menjadi kota tujuan dalam kegiatan perdagangan dan untuk menetap dan tinggal. Keadaan Kota Pekanbaru yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu sangat pesat diberbagai bidang yang mengakibatkan pada peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan tingkat kemajuan yang begitu pesat dan juga ditandai dengan banyaknya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Hal ini sangat berdampak pada perubahan karakteristik fisik kota pekanbaru akibat besarnya kebutuhan guna lahan yang berimbas pada beralihnya fungsi lahan yang sebelumnya lahan kosong atau daerah rawa akan berubah menjadi lahan permukiman atau padat penduduk. Dengan berubahnya karakteristik fisik kota pekanbaru ini harus disesuaikan pula dengan menyediakan drainase perkotaan yang memadai dan perlunya perencanaan dan pengelolaan drainase yang baik pula agar tidak terjadinya permasalahan lingkungan seperti masalah genangan air atau banjir.

Kemudian Pekanbaru saat ini sudah menjadi kota metropolitan, untuk itu perlunya penataan kota dan pengelolaan yang baik dalam pembangunan

infrastruktur fisik berupa air, bersih jalan dan lain-lainnya sehingga dapat mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota yang terpilih kota pekanbaru sebagai kota *Smart City Yang Madani* dan salah satu misinya penyediaan infrastruktur yg baik, maka perlu maka perlunya perencanaan pengelolaan pembangunan fisik kota yang baik dengan melihat pengembangan dari tingkat pembangunan infrastruktur yang terjadi yang salah satunya perkembangan saluran drainase agar tidak terjadi masalah drainase yang ada yang menimbulkan adanya genangan air atau banjir. Beberapa genangan yang terjadi disebabkan karna adanya faktor pada kondisi saluran drainase.

Kondisi drainase di kota pekanbaru saat ini, penulis menduga masih adanya drainase yang ada di berberapa tempat memiliki kondisi drainase yang mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik karna perluasan wilayah yang terbangun dalam kota dan pertambahan jumlah penduduk perkotaan maka kenaikan jumlah air yang mengalir di saluran drainase itu semakin besar untuk mengalirkan debit air yang ada. Dapat dilihat pada musim hujan atau hujan turun tiba yang mengguyur kota pekanbaru maka akan terjadinya genangan air yang cukup tinggi, gernangan air ini bahkan sampai ke badan jalan atau meluap kepermukaan jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menimbang bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan pembangunan

infrastruktur, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik. Maksud dan tujuan peraturan ini tertuang dalam pasal 2 adalah dengan maksud untuk sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dengan tujuan untuk :

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Drainase menjadi prasarana penting untuk menunjang infrastruktur pada suatu daerah perkotaan yang merupakan bangunan pelengkap jalan seperti saluran tepi jalan sebagai drainase permukaan untuk menampung dan mengalirkan air ketika hujan deras tiba yang cukup lama. Yang jika saluran drainasenya tidak berfungsi dengan baik akibatnya memberikan dampak negatif sehingga menurunnya kualitas lingkungan bagi masyarakat sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berkendara di jalan.

Masalah karakteristik genangan ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bahwa Karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial fasilitas pemerintah, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi. Dalam lampiran peraturan ini terdapat kriteria parameter genangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kriteria Parameter Genangan

NO	Parameter Genangan	Nilai	Persentase Nilai
1	Tinggi Genangan	35	
	> 0,50 m		100
	- 0,30 m - 0,50 m		75
	- 0,20 m - < 0,30 m		50
	- 0,10 m - < 0,20 m		25
- < 0,10 m	0		
2	Luas Genangan	25	
	- > 8 ha		100
	- 4 - 8 ha		75
	- 2 - < 4 ha		50
	- 1 - < 2 ha		25
- < 1 ha	0		
3	Lamanya Genangan	20	
	> 8 jam		100
	4 - 8 jam		75
	2 - < 4jam		50
	1 - 2 jam		25
< 1 jam	0		
4	Frekuensi genangan	20	
	Sangat Sering (10 kali/tahun)		100
	Sering (6 kali/tahun)		75
	Kurang sering (3 kali/tahun)		50
	Jarang (1 kali/tahun)		25
Tidak pernah	0		

Berdasarkan peraturan dalam lampirannya terdapat tabel kriteria parameter genangan diatas bahwa pada nilai tertinggi merupakan kawasan prioritas utama, makin rendah nilainya maka makin rendah pula proritasnya. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur penanganan genangan yang terjadi sehingga dapat dilihat pada tabel diatas dalam kebijakan tersebut dan data yang didapatkan sehingga dapat disimpulkan yaitu jika nilainya 50 merupakan standar genangan sudah mencukupi dan untuk nilai 75 perlu menjadi prioritas dalam penanganan banjir. Berdasarkan tabel diatas, sehinga dapat disimpulkan dengan standar tinggi genangan 30 cm, selama 4 jam, dengan standar frekuensi genangan 3 kali setahun sebagai standar genangan dan untuk yang lebih dari standar genangan yaitu melebihi 30 cm,

sekitar 4-8 jam, dengan standar frekuensinya 3 kali setahun menjadi prioritas dalam penanganan banjir. Untuk melihat alat ukur terkait genangan air yang ada disuatu wilayah maka harus disesuaikan dengan kriteria parameter genangan, seperti pada daftar genangan air di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Daftar Genangan Air Di Kota Pekanbaru 2019

No	Lokasi	Kecamatan	Besaran Genangan			
			Tinggi (m)	Luas (m ²)	Lama (Jam)	Frekuensi (Kali/Tahun)
1	Jl. Sudirman - Depan Awal Bross	Pekanbaru kota	0.4	6,000	4	3
2	Jl. Sudirman - Depan Hotel Grand Central	Pekanbaru kota	0.4	5,000	4	3
3	Jl. Sudirman - Depan RTH Kacang Mayang	Pekanbaru kota	0.4	12,000	4	3
4	Jl. Sudirman - Simp. Plasa Telkom	Pekanbaru kota	0.4	5,000	4	3
5	Jl. Sudirman - Depan Hotel Furaya	Pekanbaru kota	0.4	6,000	4	3
6	Jl H.R Subrantas - Depan Ponpes Babussalam	Tampan	0.4	2,000	4	3
7	Jl H.R Subrantas - Depan Jl. Putri Tujuh	Tampan	0.4	4,000	4	3
8	Jl H.R Subrantas - Simp. Tabek gadang	Tampan	0.4	4,000	4	3
9	Jl H.R Subrantas - Simp. Jl Bangau Sakti	Tampan	0.4	1,000	4	3
10	Jl Sukakarya	Tampan	0.3	4,000	6	6
11	Jl. Cipta Karya	Tampan	0.5	10,000	6	6

	Ujung					
12	Jl. Datuk Tunggul	Tampan	0.5	10,000	6	6
13	Jl. Garuda Sakti Km.1	Tampan	0.5	6,000	6	6
14	Jl. Arifin Ahmad - Depan KFC-Simp Jl. Paus	Marpoyan Damai	0.3	4,000	3	6
15	Jl. Arifin Ahmad - Depan Kejati/Sekolah ICS	Marpoyan Damai	0.3	3,000	3	6
16	Jl. Soekarno Hatta - Depan RS Eka Hospital	Marpoyan Damai	0.3	2,000	3	6
17	Jl. Soekarno Hatta - Pasar pagi Arengka	Marpoyan Damai	0.3	3,000	3	6
18	Jl. Soekarno Hatta - Perum Sidomulyo	Marpoyan Damai	0.3	6,000	3	6
19	Jl. Riau - Simp. Jl. H. Guru Sulaiman	Senapelan	0.3	2,000	3	6
20	Jl Kertama - Belakang pagar AURI	Marpoyan Damai	0.3	2,000	4	6
21	Jl. Rambutan - Depan kantor PTPN V	Marpoyan Damai	0.3	2,000	4	6
22	Jl. Lobak - Depan SMK Muhamadiyah	Tampan	0.3	1,000	3	6
23	Jl. Srikandi - Depan Perum Wadya Graha II	Tampan	0.3	2,000	4	6
24	Jl. Srikandi - Dekat jembatan Srikandi	Tampan	0.3	3,000	3	6
25	Jl. S. M. Amin - Depan Komp Ruko Royal Platinum	Marpoyan Damai	0.3	3,000	2	6
26	Jl. Paus - Depan	Marpoyan	0.3	2,000	3	6

	RM. Puti Buana	Damai				
27	Jl. Gulama - Simp.Baledang	Marpoyan Damai	0.3	3,000	4	6
28	Jl. Harapan Raya - Simp. Jl. Surabaya	Bukit Raya	0.3	1,000	4	6
29	Jl. Harapan Raya - Simp Tunas Jaya	Bukit Raya	0.3	1,000	3	6
30	Jl. Singgalang - Depan lapangan bola	Tenayan Raya	0.3	2,000	3	6
31	Jl . Bukit Barisan - Dekat Box culvert	Bukit Raya	0.3	1,000	3	6
32	Jl. Rawamangun - Depan kolam pancing riki	Bukit Raya	0.3	1,000	3	6
33	Jl. Parit Indah - Depan RM Sederhana	Bukit Raya	0.3	1,000	3	6
34	Jl. Parit Indah - Depan Indomaret	Bukit Raya	0.3	1,000	3	6
35	Jl. Sri Indra II - Perumahan masyarakat	Rumbai	0.5	2,000	6	6
36	Jl. Damai - Perumahan masyarakat RT.02 RW.03	Rumbai	0.5	2,000	6	6
37	Jl. Yos Sudarso - Depan RSDC Polda Riau	Rumbai Pesisir	0.3	2,000	4	6
38	Jl. Darmabakti	Payung Sekaki	0.3	4,000	6	6
39	Jl. Akasia (dkt Sungai Batak)	Tenayan Raya	0.4	2,000	6	6

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel Diatas Terdapat 39 titik genangan air, yang kemudian berdasarkan frekuensi genangan yang mengalami tahapan bagian sering (6 kali/tahun) ada di kecamatan Tampan berjumlah 11 titik, kecamatan Marpoyan

Damai berjumlah 10 titik, Kecamatan Bukit Raya berjumlah 6 Titik, kecamatan Pekanbaru Kota berjumlah 5 titik, kecamatan Tenayan dan Rumbai berjumlah 2 titik dan kecamatan rumbai pesisir dan payung sekaki berjumlah 1 titik.

Berdasarkan tabel diatas pada bagian sering banyak terdapat pada kecamatan Tampan berjumlah 11 titik yaitu di jalan Jl H.R Subrantas - Depan Ponpes Babussalam, Jl H.R Subrantas - Depan Jl. Putri Tujuh, Jl H.R Subrantas - Simp. Tabek gadang, Jl H.R Subrantas - Simp. Jl Bangau Sakti, Jl Sukakarya, Jl. Cipta Karya Ujung, Jl. Datuk Tunggul, Jl. Garuda Sakti Km.1, Jl. Lobak - Depan SMK Muhamadiyah, Jl. Srikandi - Depan Perum Wadya Graha II, Jl. Srikandi – Dekat jembatan Srikandi. Daerah tersebut sering mengalami yaitu 6 kali dalam setahun.

Permasalahan yang ada pada drainase yang terjadi di kota Pekanbaru secara umum yaitu permasalahan genangan air atau banjir, hal ini akibat adanya sumbatan pada bangunan-bangunan drainase seperti saluran air pada permukaan yang mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik untuk menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik sehingga meluap ke permukaan jalan yang dapat menimbulkan gangguan transportasi dan kerusakan jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berkendara di jalan. Kemudian yang menjadi penyebab adalah:

“adanya sumbatan pada drainase, baik yang diakibatkan kerusakan struktur, maupun tingginya endapan sedimen disalurannya. Misalnya seperti di jalan Garuda Sakti, drainase disini tidak berfungsi dengan baik karena adanya sumbatan. Sumbatan itu disebabkan karena memang strukturnya rusak, ataupun tingginya sedimen di drainase,” jelasnya. (Sumber: Go Riau.com

kepada kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi yang diterbitkan selasa,18/06/2019) dari : <https://www.goriau.com/berita/baca/kota-pekanbaru-rawan-banjir-indra-pomi-banyak-drainase-yang-tersumbat.html>

Selanjutnya Permasalahan yang terjadi disebabkan karena berkurangnya daerah resapan air dan adanya drainase yang tertutup atau menutup jalan air yang disebabkan oleh dari bangunan jalan penghubung ke halaman ruko, seperti yang terjadi di jalan HR. soebrantas yang diduga sejumlah pemilik ruko disana sengaja menutup drainase yang ada secara permanen sehingga dapat membuat aliran drainase itu menjadi tersumbat dan menjadi tidak lancar. hal ini diperkuat dengan berita online Tribunpekanbaru.com (Sumber: TribunPekanbaru diterbitkan 05/07/2019) dari : <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/07/05/banyak-ruko-di-jalan-hr-soebrantas-pekanbaru-tutupi-drainase-secara-permanen-sebabkan-rawan-banjir>

Permasalahan drainase tersebut yang sering terjadi adalah adanya drainase yang ada tersumbat oleh adanya sampah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir karna tidak bisa menampung air hujan atau volume debit air, dan ini merupakan masalah yang cukup serius yang harus diperhatikan dengan menata bangunan drainase yang ada, jika tidak dibenahi maka banyaknya genangan air seperti yang terjadi di kecamatan tampan pada ruas jalan tertentu yang sering mengalami genangan air diantaranya di jalan HR.Soebrantas (simpang Tobek Godang), Jl.Lobak, Jl.Srikandi, Jl. Sukakarya dan Jl.garuda sakti.

Pada Drainase Jalan memiliki dua jenis yaitu drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Perencanaan yang dilakukan dalam menyusun perencanaan pada drainase dapat dilihat dari sebuah pedoman perencanaan

drainase pada manual desain yang digunakan di Indonesia salah satunya yaitu didasarkan pada:

1. Perencanaan Sistem Drainase Jalan Pd T-02-2006-B (Departemen Pekerjaan Umum, 2006). Yaitu membahas Manual desain tentang detail terkait saluran drainase yaitu drainase permukaan yang berfungsi untuk mensuplai limpasan air hujan yang turun ke permukaan jalan yaitu saluran samping jalan agar tidak merusak struktur perkerasan pada jalan.
2. Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2013 (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2013). Yaitu membahas manual desain perkerasan jalan yang di dalamnya memberikan panduan terkait perancangan sistem drainase pada saluran drainase bawah permukaan yang berfungsi untuk mengakomodir saluran pada lapisan pondasi bawah (sub base) permukaan tanah dan pondasi kedap air pada badan jalan sehingga mampu mengalirkan air yang dapat memasuki perkerasan jalan yang terjebak pada lapisan bawah permukaan.

Kemudian pada jalan juga harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yaitu drainase hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 19 tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dalam pasal 21 yang menyebutkan bahwa terdapat bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan meliputi saluran tepi jalan, gorong-gorong dan dinding penahan tanah. Saluran tepi jalan untuk drainase permukaan harus mampu mengalirkan debit air pada permukaan jalan.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai salah satu dinas sebagai unsur pelaksana dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangnya. Yang ada hubungannya dengan Drainase yang Salah satu tugas menangani drainase adalah bidang Bina Marga yang bertugas dalam menangani jalan dan jembatan juga menangani persoalan drainase seperti saluran tepi jalan. Pada bidang Bina Marga memiliki Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga yaitu :

1. Tugas Bidang Bina Marga yaitu membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan Bina Marga.
2. Fungsi Bidang Bina Marga yaitu:
 - a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, perservasi jalan dan jembatan.
 - b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
 - d. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan perservasi jalan dan jembatan peralatan dan pengujian.
 - h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.

- i. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
- j. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahi Seksi Perencanaan Bina Marga, Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dan Seksi preservasi Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang bina marga yang juga menyangkut tugas jalan dan jembatan juga drainase jalan sebagai pendukung konstruksi jalan atau sebagai penanganan agar struktur perkerasan jalan atau badan jalan agar tidak rusak yang salah satu penyebabnya adalah genangan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang menyebutkan pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi drainase perkotaan sesuai dengan rencana. Hal ini untuk menjaga saluran drainase yang ada itu berfungsi maka diperlukan pemeliharaan agar alirannya lancar dan drainase yang ada tidak mengalami penurunan fungsi, akibat drainase yang tersumbat dan untuk menjaga, mengatur dan mengontrol air hujan yang masuk kesaluran supaya tidak adanya genangan air. Kegiatan pemeliharaan itu meliputi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitas dan pemeliharaan khusus. Dinas PUPR Kota Pekanbaru upaya penanganan yang dilakukan agar alirannya tidak tersumbat yaitu pembersihan-pembersihan pada drainase yang ada dengan melakukan pengerukan sedimen/sampah pada drainase agar tidak tersumbat, karna jika drainase yang mengalami penurunan fungsi itu diperlukan

perencanaan yang tepat. Sehingga masih adanya dinding drainase yang roboh seperti di jalan sukakarya yang masih tidak diperbaiki sampai saat ini. Hal ini diperkuat dengan berita (TribunPekanbaru yang diterbitkan 20 november 2018. Penulis melihat sendiri ke lokasi pada 3 desember 2019 jalan sukakarya bahwasanya benar sampai saat ini masih adanya dinding drainase yang roboh di jalan sukakarya tersebut.

Dengan adanya kegiatan pembersihan-pembersihan drainase tersebut yang berguna untuk menangani drainase yang ada agar tidak tersumbat untuk mencegah dan mengontrol agar tidak terjadinya genangan air, namun masih adanya drainase di beberapa titik yang tidak berfungsi dengan baik dalam menampung dan mengalirkan kelebihan air seperti intensitas hujan yang tinggi sehingga meluap ke permukaan jalan. Kegiatan pembersihan drainase sebagai upaya pencegahan banjir ini diperkuat diberita online :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Riau terus memaksimalkan pembersihan drainase dan anak sungai dalam upaya pencegahan banjir. Ia mengaku saat ini pihaknya hanya dapat melakukan penanganan jangka pendek, berupa normalisasi anak sungai dan pembersihan drainase jelang masterplan penanganan banjir rampung. (Sumber: InfoPublik.id kepada kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi yang diterbitkan selasa,5/08/2020)
<http://infopublik.id/kategori/nusantara/472222/pupr-pekanbaru-maksimalkan-pembersihan-drainase-dan-anak-sungai>

Selanjutnya yang menjadi penyebab masalah yang terjadi pada drainase di kota pekanbaru yaitu sikap atau tindakan masyarakat yang kurang peduli akan akibatnya terhadap lingkungan seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menghambat aliran air atau laju air pada saluran drainase, seperti penulis

lihat disekitaran pasar-pasar yang ada, seperti pasar pagi arengka dan pasar lainnya. Disana terlihat banyaknya tumpukan sampah yang berserak di aliran drainase, hal ini penulis menduga pedagang sekitaran pasar tersebut sengaja membuang sampah itu yang merupakan sisa-sisa dari hasil dagangannya. Kondisi drainase sekitaran pasar tersebut terlihat menjadi tidak sehat atau jorok dan kotor akibat sampah yang dapat membuat aliran drainase itu menjadi tersumbat dan dapat menimbulkan banjir.

Kemudian yang menjadi masalah adalah “ belum adanya peta induk drainase dan anak sungai di Kota Pekanbaru membuat penanganan banjir menjadi tidak maksimal. Apalagi, banjir yang muncul saat musim hujan terjadi salah satunya karena tidak efektifnya saluran air atau drainase yang ada. hal ini diperkuat berita online :

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (10/2) mengatakan, Di sisi lain, pihaknya belum memiliki peta induk drainase dan sungai untuk penanganan permasalahan banjir. "Sekarang, ka-mi sedang menyusun peta induk drainase dan anak sungai. (diterbitkan Riaupos.jawapos.co 11/2/2020). Dari: <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/11/02/2020/223399/30-titik-rawan-banjir--%E2%80%99%E2%80%99kepong%E2%80%99%E2%80%99-pekanbaru.html>

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menduga terdapat beberapa fenomena permasalahan yaitu :

1. Belum optimalnya tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan drainase yang dapat menimbulkan drainase yang ada itu mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik sehingga masih adanya titik-titik

genangan air atau banjir yang meluap ke permukaan jalan tertentu, terutama pada daerah kecamatan tampan yang sering mengalami genangan air seperti di di jalan HR.Soebrantas-simpang Tobek Godang, Jl.Lobak- depan SMK Muhammadiyah, Jl. Srikandi – Dekat jembatan Srikandi, di Jl. Sukakarya dan Jl.garuda sakti.

2. Pembersihan pada saluran drainase jalan belum sepenuhnya dilakukan secara merata atau menyeluruh karna masih ditemui pada saluran drainase jalan adanya tumpukan sampah yang menimbulkan aliran airnya tersumbat dan minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat drainase yang ada.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam perbaikan drainase Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu **Bagaimana Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru?**

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

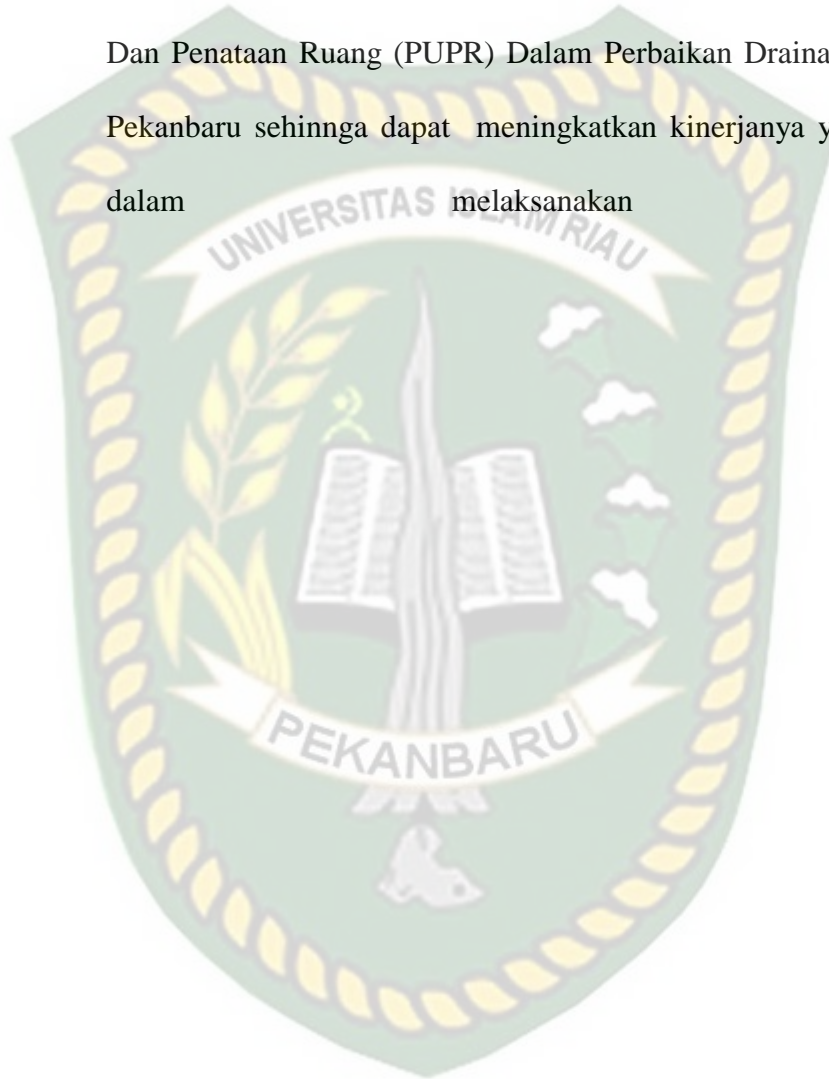
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis sebagai pengembangan ilmu pemerintahan yang diperoleh penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan informasi bagi para peneliti untuk melakukan penulisan skripsi mengenai Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru guna memperoleh gelar sarjana (stara satu) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

c. Kontribusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru sehingga dapat meningkatkan kinerjanya yang terkait dalam melaksanakan tugas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi yang di dalam kata pemerintahan terdapat kata dasar “perintah”, kata perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, ada 4 (empat) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu ada dua pihak unsur yang diperintah disebut pemerintah yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya dan pihak yang diperintah disebut rakyat memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang syah serta antara keduanya terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal. Setelah mendapat awalan “pe-” menjadi pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. kemudian setelah mendapat akhiran “-an” menjadi pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. (Syafii'ie 2003;3-4)

Menurut kitab suci Al-Qur'an (3;104) pemerintahan adalah segolongan umat untuk mengajak kepada kebaikan, kebenaran dan melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung (dalam Rahman, 2009;2)

Menurut Rasyid (2000;13) keberadaan pemerintahan pada awalnya adalah kebutuhan, kebutuhan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan

meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri,, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Kemudian menurut Ridwan (2011:30-31) pemerintahan merupakan sesuatu kegiatan dalam menjalankan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bersama. Dalam hal ini pemerintahan yang keberadaannya sebagai kemampuan untuk memimpin hidup bersama dalam memenuhi dan melindungi masyarakatnya tanpa merugikan orang lain dan dapat menjaga sistem ketertiban. Sehingga keberadaan pemerintahan itu ada terdapat dua macam kelompok yaitu sebagai organisasi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Syafiie (2005:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Soemendar (dalam Syafi'ie, 2013;32) ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting (the important body) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-pengetahuan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian juga tentang ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2011).

Dalam definisi ilmu pemerintahan menurut Rosental (dalam syafiie, 2013;34) adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut Brasz (dalam syafiie 2013;35) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Dari definisi ilmu pemerintahan yang disimpulkan menurut syafiie (2013;36) mengatakan Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah, sehingga dapat mengetahui proses dalam pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berguna untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan ini udah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daeah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut tersebut maka dibentuklah suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam UUD 1945 pasal 18 tersebut maka Dibentuklah Pemerintah Daerah yaitu daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sehingga Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Yang menjadi dasar pelaksanaannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ini diatur dalam pasal 58 dalam Undang-Undang nomor 23 bahwa terdapat asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggara negara
- c. Kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi

- i. Efektivitas
- j. Keadilan

Menurut Yusri Munaf (2016;47) dalam bukunya hukum administrasi negara mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. sedangkan dalam proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat tergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut. Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan.

Selanjutnya juga menurut Yusri Munaf (2016;64-65) Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) berasal dari istilah *governance* dikenal era 90-an merupakan paradigma baru dalam pemerintahan sebagai proses pengambilan keputusan, sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 2 golongan, yaitu:

1. Golongan I dilihat dari Proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan.

- b. Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga Negara.
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan/motifasi) dengan dictum/penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu :
- a. Asas larangan kesewenang-wenangan
Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenangnya adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan/pendapat.
 - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *deteournement depouvoir*.
Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan undang-undang.
 - c. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - d. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

e. Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

f. Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

g. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan asas akuntabilitas membutuhkan prinsip-prinsip, seperti;

- Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
- Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku,
- Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

- Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
- Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi adalah memberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam membuat keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya dengan menghormati dan mematuhi aturan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan tentang otonomi daerah pada pasal 1 angka 6 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Republik Indonesia. Kemudian daerah otonom dalam Undang-Undang ini dalam pasal 12 menyebutkan daerah otonom atau daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dipimpin oleh pemerintah daerah yaitu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. DPRD dan kepala daerah ini berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai

fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah dan DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam hal ini pemberian otonomi daerah ini memberi bagi daerah otonom dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerahnya untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas nyata dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi ini memberikan kesempatan ruang dan keleluasaan bagi daerah juga dapat memberikan sebuah tantangan dan kewajiban bagi daerah dalam mengurus urusan pemerintahan dan mengatur daerahnya dalam menangani kebutuhan dan permasalahan yang terjadi demi kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaan proses perubahan yang diselenggarakan secara bertahap, terencana dan sistematis, yang pelaksanaan otonomi daerah ini menggariskan adanya pedelegasian wewenang (desentralisasi) kepada daerah otonom, yang berguna untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.

Menurut Nugroho (2000;90) menyebutkan peran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu meliputi:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, yang semula melaksanakan semua urusan pemerintahan yang sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat

menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang tujuannya pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem NKRI.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan;
3. Asas tugas pembantuan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada hakikatnya pemerintahan daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yaitu daerah diberi kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yang pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

4. Tugas Pemerintahan

Tugas menurut Moekijat (1998:11) adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sedangkan menurut Nirmala (2003:500) adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan wajib dikerjakan oleh seseorang.

Dalam pelaksanaan tugas menurut Siagan (2003;6) adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan Menurut Moekijat (1998;2) pelaksanaan tugas nya yaitu seberapa banyak pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi tugas itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengerjakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya Thoha (2010;79) Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Rasyid dalam zaidan (2013;25-26) mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan yang mencakup dalam tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

5. Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Pada hakekatnya fungsi yang menjadi dasar pemerintah adalah memberikan pelayanan umum secara maksimal kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri sering disebut “pelayanan masyarakat” untuk itu pemerintah dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan dari kegiatan kenegaraan serta disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

Menurut Surianingrat (2010;63) Tugas-tugas yang menjadi kewajibannya pemerintah dalam mengurus rumah tangga negara bisa diartikan dalam fungsi pemerintah. Tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yakni sebagai berikut;

- a. Pelayanan (service) yang membuat keadilan dalam masyarakat yang secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai kesetaraan.
- b. Pemberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian masyarakat untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dengan cara mengelola sumber daya daerahnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

- c. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan diwilayahnya.

Pada Fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan sebagai fungsi pemerintahan dinegara berkembang, melainkan *ad interim* yaitu bersifat sementara, tidak untuk selamanya, hal ini pembangunan bukanlah fungsi pemerintahan tapi lebih ke fungsi ekonomi, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Dan pada pemberdayaan itu terdapat arti *empowering*, yaitu pemberian hak dan kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan masa depannya serta dalam arti *enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Ndarha (2011;75)

6. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2004;101) perumusan kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya menurut Nugroho (dalam Tahir 2014;27) menegaskan bahwa secara sederhana rentan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro (umum dan mendasar secara keseluruhan) yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang (UU)/Peraturan Perundang-Undangan (Perpu), (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat (meso) atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini berbentuk Peraturan Menteri, surat edaran

Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya juga dapat berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Istilah kebijakan ini menurut Shore dan Wright (dalam Marzali 2012;19) berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak atau akibat dari pelaksanaan dalam pengambilan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan.

Kemudian menurut Friedrich (dalam Wibawa 2011;2) kebijakan itu adalah melakukan sesuatu yang dari usulan kelompok atau pemerintah yang dalam suatu lingkungan itu ada hubungannya dengan kendala sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan dengan merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Perumusan kebijakan menurut Dunn (2003;105) adalah suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Terdapat indikasi dari perumusan kebijakan ini yaitu:

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, yaitu penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebijakan itu merupakan tindakan yang dibuat oleh suatu kelompok atau pemerintah untuk memilih bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memilih cara-cara bertindak yang telah dibuat secara terencana yang menjadi ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu sehingga dapat menetapkan atau mengarahkan dalam pengambilan keputusan dan tercapai demi kelancaran dalam mencapai tujuan.

7. Konsep Evaluasi

Dalam segi proses evaluasi, menurut Ndraha (2003;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sedangkan menurut Nurcholis (2005;169) Evaluasi ini adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil

yang seharusnya di capai sesuai perencanaan yang ditetapkan sehingga mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi adalah membandingkan tentang suatu persoalan yang penting mengenai pendapat tapi juga persoalan kenyataan yang ditemui dengan cara mengukur sejauh mana tindakan kinerja yang dilaksanakan pada suatu kebijakan sehingga dapat mengetahui dan menilai bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dikerjakan dalam mencapai tujuan dan dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan bisa dikatakan sebagai proses yang mendasar dalam menentukan nilai yang dapat mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan dari hasil tindakan pada pelaksanaan suatu program yang telah direncanakan atau yang telah dilaksanakan agar dapat melihat dari kesalahan yang terjadi dimasa lalu dan kedepannya dapat memberi kesempatan akan meningkat menjadi lebih baik

Menurut Dunn dalam bukunya analisis kebijakan publik (2003;608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemeberian angka (*rating*) dengan penilaian. Sedangkan Dunn dalam Leo Agustino (2006;163-164) menyatakan ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Beberapa pendekatan evaluasi tersebut adalah:

1. Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*)

Adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa

berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan.

2. Evaluasi Formal (*formal evaluation*)

Adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil suatu kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*desicision theoretic evaluation*)

Adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan secara ekplisit yang dinilai dari pelaku kebijakan.

Evaluasi menurut William N.Dunn (2003;429) terdapat indikator evaluasi yaitu:

- a. Efektivitas yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang berkenan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dalam meningkatkan efektivitas tertentu, dalam hal ini efektifitas dan efisiensi saling berhubungan karna efisiensi itu ke bagaimana penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecah masalah atau berkenan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah yang dirasakan sudah mencukupi dalam berbagai hal.
- d. Perataan yaitu kebijakan publik memiliki arti keadilan atau kewajaran. Dalam dunn perataan ini menyebutkan yaitu kriteria kesamaan yang

berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat

- e. Responsivitas yaitu seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu sebagai respon dari suatu aktivitas untuk melihat suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakatnya.
- f. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut, untuk menseleksi sejumlah alternatif sebagai kriteria kelayakan apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kemudian evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan

William N.Dunn (2003:610) yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik untuk menilai seberapa jauh tujuan tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target dan juga menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Dalam analisis kebijakan sebagai alternatif menentukan atau memilih kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada, sedangkan dalam evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang dikerjakan atau telah dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan evaluasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses penilaian untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dengan melihat dan mengukur pada tindakan suatu

kinerja yang dilakukan seseorang pada suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya agar sesuai dengan tujuan yang dicapai yang didalamnya sebagai upaya peningkatan terhadap pelaksanaan suatu program yang digunakan sebagai pengukuran agar jauh lebih baik lagi sehingga dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi.

Tabel II.I Kriteria-Kriteria Evaluasi Yang Diilengkapi Dengan Ilustrasi Menurut William N.Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektifitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria pareto kriteria kaldorhicks kriteria rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

8. Konsep Perbaikan

Perbaikan sebagai upaya pada usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi sehingga dapat mengurangi dan meningkatkan suatu proses (Gasper,2007). selanjutnya Vincent Gasper, perbaikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsi fungsional

suatu sistem produksi sehingga dari sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Sistem perbaikan dapat dipandang sebagai bayangan dari sistem produksi, dimana apabila sistem produksi beroperasi dengan kapasitas yang sangat tinggi maka akan lebih intensif. (Vincent Gasper, 94, Hal :513)

Sedangkan menurut Suripin (2004;325) bahwa perbaikan merupakan suatu kegiatan dengan usaha-usaha untuk dapat mengembalikan kondisi dan/atau fungsi saluran dan/atau bangunan-bangunan drainase.

9. Konsep Drainase

Menurut Suripin (2004) dalam bukunya sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan yang merupakan salah satu infrastruktur perkotaan yang penting yang didalamnya menyebutkan terdapat infrastruktur perkotaan yang salah satunya sistem drainase air hujan atau saluran air, drainase itu mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air permukaan timbul dari air hujan atau kelebihan air yang ada. Drainase juga merupakan salah satu penanganan tentang masalah adanya kelebihan air, baik diatas permukaan maupun dibawah permukaan.

Kemudian juga Menurut Suripin (2004) terdapat drainase jalan raya yang merupakan salah satu faktor penting pada perencanaan perkerasan jalan untuk melindungi jalan dari air permukaan dan air tanah, untuk itu genangan air yang terjadi di permukaan jalan berpengaruh pada permukaan jalan.

Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Kemudian Drainase sebagai bangunan pelengkap jalan seperti saluran tepi jalan sebagai drainase permukaan untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau debit air pada permukaan jalan. Berdasarkan fungsinya drainase jalan raya yaitu :

1. Sebagai drainase permukaan untuk menghilangkan air hujan atau membawa debit air dari air hujan yang ada dipermukaan jalan.
2. Meminimalisir air hujan agar tidak meluap ke struktur jalan sehingga dapat melindungi dari kerusakan jalan agar tidak merusak pada struktur jalan dan perkerasan jalan dari air dipermukaan serta mengganggu para pengendaraan yang melintas akibat timbulnya genangan.
3. Untuk memperpanjang umur ekonomi pada prasarana fisik seperti jalan yang merupakan faktor penting dalam perencanaan perkerasan jalan sehingga melindungi prasarana dan sarana perkotaan yang sudah terbangun.
4. Untuk menampung air permukaan yang mengalir menuju jalan dan menyalurkan air hujan masuk ke saluran air di permukaan yang tujuannya agar genangan air tidak menggenangi permukaan jalan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

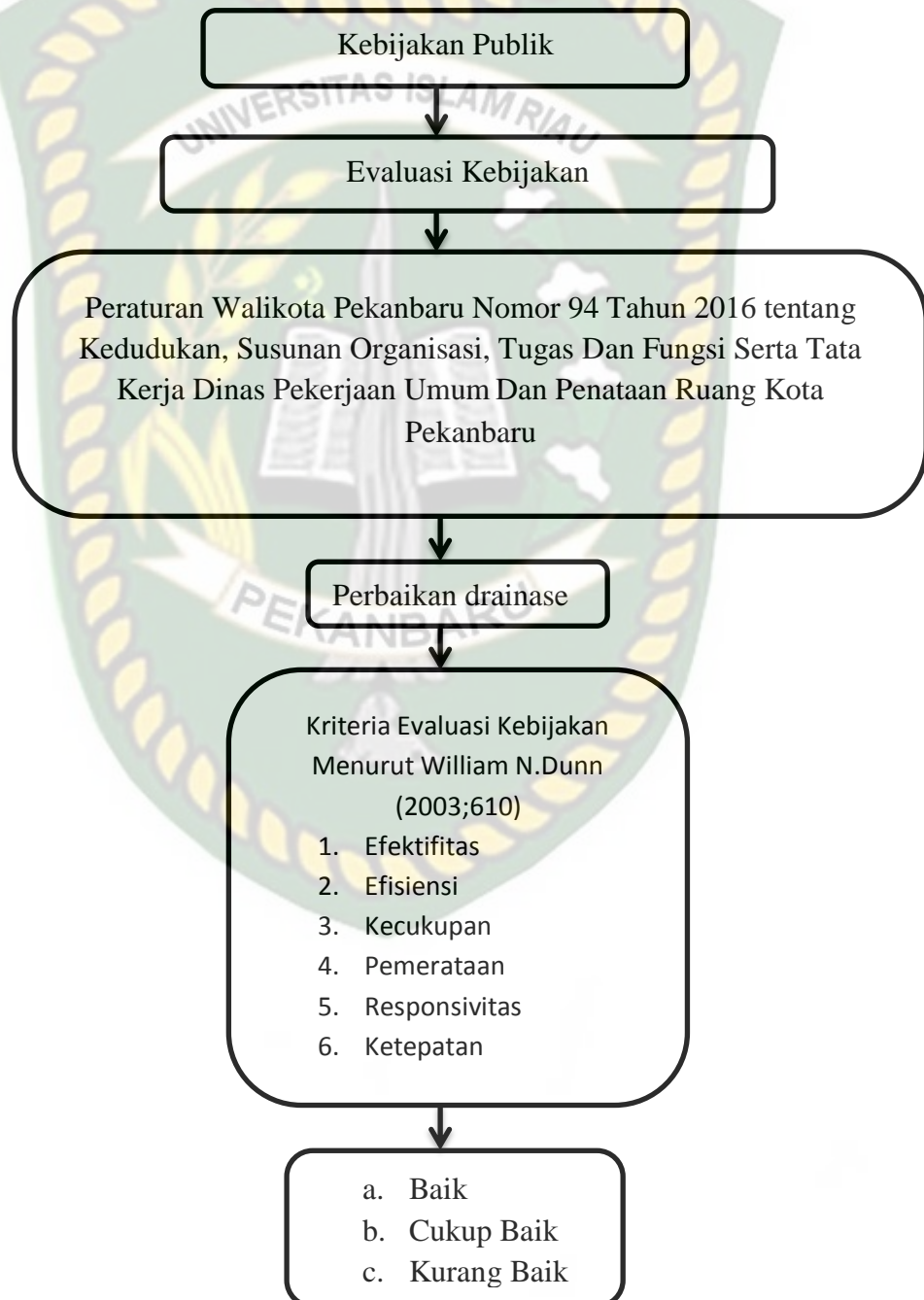
10. Penelitian Terdahulu

Tabel II.II Penelitian Terdahulu Mengenai Penelitian Yang Terkait Dalam Judul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru

No	Nama	Judul	persamaan	Perbedaan
1	Novilse Yuliadi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2017	Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase Oleh Dinas Perumahan, Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terkait drainase juga menyangkut kegiatan pemeliharaan dan sama-sama kota pekanbaru	Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah perbedaan dalam segi waktu, dimana penulis melakukan penelitian tahun 2019, sementara saudara Novilse Yuliadi melakukan penelitian 2017
2	Dimitri Fairizi	Analisis dan evaluasi saluran drainase pada kawasan perumahan talang kelapa di Subdas Lambidaro Kota Palembang	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dari segi obyeknya yaitu bidang drainase	Perbedaannya adalah penulis meneliti evaluasi tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru, sedangkan saudara Dimitri Fairizi meneliti terkait analisis dan evaluasi di suatu perumahan
3.	Pebri Ana. S Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau 2015	Penataan Infrastruktur Drainase Di Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada focus penelitian drainase dan lokasi penelitian di kota pekanbaru	Perbedaannya adalah dari segi waktu pengerjaannya dalam penelitian dan dari segi obyeknya yaitu saudara pebri terkait penataan infrastruktur drainase di kota pekanbaru sedangkan peneliti evaluasi tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam perbaikan drainase di kota pekanbaru

11. Kerangka Pikir

Gambar II.I Kerangka Pikiran Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru



12. Konsep Operasional

Konsep operasional berguna sebagai arah dan pedoman dalam memberikan penjelasan dan pemahaman agar dapat memudahkan penelitian dengan membatasi batasan-batasan pembahasan rangkaian ruang lingkup kajian kegiatan penelitian mengenai permasalahan Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru, maka penulis merasa perlu membatasi dengan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan melakukan penelitian yang akan dilakukan, konsep-konsep tersebut antara lain :

1. Pemerintahan adalah Organ yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam proses menata kelola kehidupan masyarakat yang tujuannya untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan untuk mengatasi suatu persoalan.
2. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam permasalahan drainase.
3. Evaluasi adalah suatu proses untuk menilai dengan mengukur dengan penaksiran dan pemeberian angka dari hasil-hasil suatu kegiatan dalam tujuan yang dicapai.
4. Perbaikan adalah usaha yang dilakukan dalam suatu tindakan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsi fungsional pada drainase diharapkan agar tidak adanya lagi genangan air yang meluap

ke permukaan jalan ketika hujan atau sebagai upaya pada usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganan adanya genangan atau banjir.

5. Drainase adalah berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
6. Efektivitas adalah suatu pencapaian yang dilakukan dengan melakukan metode-metode yang telah ditetapkan secara tepat dan benar serta terarah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah direncanakan atau telah dibuat. . Dan apakah hasil atau target yang diharapkan telah tercapai sehingga menentukan tingkat keberhasilan yang berkualitas dalam mencapai tujuan.
7. Efisiensi adalah sejumlah usaha dalam memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar tercapainya sebuah pencapaian hasil efektivitas tertinggi dengan biaya seminimal mungkin.
8. Kecukupan adalah suatu hal yang dicapai pada tingkat efektifitas dimana tidak lebih maupun tidak kurang yang dapat memuaskan kebutuhan yang menekankan pada kebijakan yang memadai dalam memaksimalkan pelaksanaan program.
9. Perataan adalah keadaan sosial dengan konsep keadilan bersama secara menyeluruh yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha agar suatu program tertentu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, atau apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu yang dalam kebijakan publik memiliki arti keadilan.

10. Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dari suatu kegiatan untuk merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan sasaran kebijakan publik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan program-program yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

11. Ketepatan merupakan kemampuan menilai tujuan program untuk mengarahkan sejumlah alternative yang disarankan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuannya sehingga dapat diterapkan secara terarah.

13. Operasional Variabel

Tabel II.III Operasional Variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan drainase di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
Evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.	Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan drainase Di Kota Pekanbaru	1. Efektifitas	a. Perencanaan penanganan genangan air	Baik
			b. Penyusunan program perbaikan drainase	Cukup Baik
			c. Pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik	Kurang Baik
			2. Efisiensi	a. Pembentukan Tim kerja
			b. Ketersediaan Anggaran Kerja	Cukup Baik
			c. Upaya Dinas dalam memperbaiki drainase dikiri dan kanan jalan	Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Hubungan kerjasama atasan dan bawahan	Baik
		b. Ketersediaan fasilitas peralatan	Cukup Baik	

N.Dunn (2003,608)			c. Pembangunan sesuai dengan kapasitas daya tampung	Kurang Baik
	4. Perataan		a. Pemantauan kondisi drainase	Baik
			b. Pemeliharaan atau pembersihan drainase	Cukup Baik
			c. perbaikan saluran drainase berada di kanan dan kiri jalan	Kurang Baik
	5. Responsivitas		a. Sosialisasi kepada masyarakat	Baik
			b. Keluhan masyarakat	Cukup Baik
		c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	Kurang Baik	
6. Ketepatan		a. Kinerja dalam perbaikan drainase	Baik	
		b. Pelaksanaan terkait koreksi drainase yang mengalami genangan air.	Cukup Baik	
		c. Pengevaluasi kapasitas saluran drainase	Kurang Baik	

14. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru, teknik pengukuran atau skala yang digunakan untuk setiap penilaian indikator dan variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Ukuran Penilaiannya yaitu:

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.

2. Efisiensi

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.

3. Kecukupan

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.

4. Perataan

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.

5. Responsivitas

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.

6. Ketepatan

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variabel Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru berada dalam persentase antara 0%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *survey deskriptif* dengan metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data dengan penggunaan angka-angka, yang kemudian menguraikan data tersebut dimasukkan kedalam tipe survey deskriptif yang dilakukan dengan mengambil sampel sebagai perwakilan dari populasi dengan alat pengumpulan data yang pokok sehingga memperoleh gambaran berdasarkan pengamatan dilapangan sehingga diperoleh rumusan analisa atau bertujuan untuk meringkas berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tersebut, (Bungin, 2013;44).

Jadi metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif, untuk mengambil sampel dari suatu populasi tertentu dengan alat bantu penelitian dalam pengumpulan data berupa kuisisioner dan wawancara langsung dengan pihak dari perwakilan populasi yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yang menjadi objek penelitian ini pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pekanbaru di jalan Jl. Dt. Setiamaharaja No.02 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284. Adapun penulis

memilih lokasi tersebut karna adanya fenomena yang terjadi seperti drainase yang mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik yang fungsi drainase itu mampu menampung dan mengalirkan air limpasan air hujan yang menimbulkan adanya genangan air di beberapa ruas jalan tertentu seperti di kecamatan Tampan yang terkena sering mengalami genangan air diantaranya Jl. H.R. Soebrantas, Jl. Lobak, Jl. Srikandi dan Jl. Sukakarya, Jl. Garuda Sakti, genangan air tersebut memberikan dampak terhadap pengendara yang melintas ketika hujan deras tiba.

Di JL. HR. Soebrantas- Simpang Tabek Godang banjir timbul karna adanya penumpukan sampah yang mengendap dan sebagai tempat langganan banjir, Jl. Lobak dan di Jl..Srikandi timbul banjir karna intensitas hujan yang lama sehingga air sungai itu meluap kepermukaan jalan, Jl. Sukakarya timbul genangan karna adanya drainase yang tertumpuk sampah dan tidak memiliki drainase dan banyaknya yang tidak memiliki bangunan drainase begitu pula di Jl. Garuda Sakti masih banyaknya tumpukan sampah. Hal ini membuat drainase tidak bisa menampung dan mengalirkan aliran air hujan tiba yang dapat meluap ke permukaan jalan dan menimbulkan adanya banjir.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan suatu generalisasi atau keseluruhan atas objek atau subjek yang ada di suatu wilayah tertentu dengan memenuhi karakteristik dan syarat-syarat tertentu sebagai keseluruhan individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti yang menjadi sumber pengambilan sampel yang

berkaitan dengan masalah penelitian. Pengertian Populasi dan sampel dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok obyek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. (Bungin, 2013;109). Jadi populasi merupakan generalisasi keseluruhan pada suatu objek penelitian yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini sebagai sasaran penelitian yang menjadi narasumber data yang digunakan sehingga dapat dipelajari dan menarik kesimpulan.

2. Sampel

Dalam penelitian sosial, dikenal hukum kemungkinan - hukum probabilitas – yaitu kesimpulan yang ditarik dari populasi dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Kesimpulan ini dapat dilakukan karena pengambilan sampel dimaksud adalah untuk mewakili seluruh populasi. (Bungin, 2013;111). Jadi sampel merupakan sebagian dari seluruh individu atau anggota populasi yang menjadi objek penelitian dengan mengamati hanya bagian dari populasi yang terkait penelitian menggunakan teknik tertentu dengan tujuan memperoleh keterangan.

Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga sebagai key informan, berikut terkait populasi dan sampelnya:

Tabel III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pekanbaru Dalam Perbaikan Drainase

NO	Populasi	Jumlah		Persemtase
		populasi	Sampel	
1	Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga	1	1	100%
2	Pegawai Dinas PUPR Pekanbaru	69	10	100%
3	Masyarakat sekitar yang terkena dampak genangan air di beberapa ruas jalan tertentu	~	20	100%
Jumlah		70	31	100%

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel (teknik sampling) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang bertujuan untuk memperoleh data informasi dalam melakukan penelitian ini yang penulis gunakan untuk penarikan sampel yaitu Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga menggunakan sensus sampling yang dijadikan sampel karena mudah dijumpai dan tidak memungkinkan untuk disensus satu persatu, Pegawai Dinas PUPR Pekanbaru menggunakan teknik (purposive sampling) yaitu dalam penarikan sampel penulis menentukannya sendiri dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tujuan penelitian,

sedangkan untuk Masyarakat sekitar yang terkena genangan air menggunakan teknik (accidental sampling) yaitu dalam penarikan sampel penulis melakukan penelitian dengan menjadikan responden penelitian siapa saja yang kebetulan peneliti untuk ditemui atau dijumpai.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data utama yang peneliti kumpulkan sendiri yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dari sumber data yang didapatkan dari responden yang terpilih, dijadikan sebagai sampel.
2. Data sekunder adalah data pendukung peneliti yang diperoleh untuk melengkapi data primer untuk mendukung hasil penelitian ini dan menunjang objek yang diteliti yang bersumber dari Dinas PUPR kota Pekanbaru melalui pengumpulan dokumen, buku-buku, dan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dibutuhkan data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi (*pengamatan*)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian

tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti menggunakan pancaindra. (Bungin, 2013;144). Dalam hal ini teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara. (Bungin, 2013;136). Dalam hal ini teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden.

3. Kuisioner (*Quessioner*)

Kuisioner merupakan serangkaian atau lembaran pertanyaan berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam, kemudian diberikan untuk diisi oleh para responden untuk memberikan jawaban., setelah diisi lalu dikembalikan ke peneliti. (Bungin, 2013;133).

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan bahan-bahan seperti photo dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dengan cara deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan, diperoleh, lalu data tersebut dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data lalu dikelompokkan kemudian diolah dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan disajikan berdasarkan yang ditemui dilapangan dengan tabel yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Perincian jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di kota Pekanbaru

NO	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2019															
		I Februari- Juli				II Agustus				III September				IV Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■															
2	Seminar UP		■														
3	Revisi UP			■													
4	Revisi kuisisioner				■												
5	Rekomendasi Survey					■											
6	Survey Lapangan						■										
7	Analisis Data							■									
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian								■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi									■							
10	Ujian Komprehensif Skripsi											■					
11	Revisi Skripsi													■			
12	Penggandaan Skripsi															■	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukotanya Provinsi Riau, dengan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² yang telah ditetapkan dari hasil pengukuran BPN Tk I Riau. Kemudian secara geografis kota pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara, serta ketinggiannya berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut yang dimana kota ini dibelah oleh aliran sungai siak dari barat hingga timur, serta memiliki anak sungai seperti sungai: Umban Sari, Sail,, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau Dan Tampan, dengan permukaan wilayahnya pada bagian utara adalah dataran landai dan bergelombang serta ketinggiannya berkisar antara 5-11 meter

Berdasarkan letaknya kota Pekanbaru ini memiliki posisi sangat strategis sebagai jalur lintas timur Sumatera yang letaknya yang berada pada tengah-tengah Pulau Sumatera dan berada di posisi tengah Provinsi Riau serta dikelilingi oleh daerah yang kaya akan sumber daya alamnya yang diapit oleh Kabupaten yang batas-batas wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Kampar pada bagian selatan dan barat serta berbatasan dengan kabupaten pelalawan pada bagian timur dan selatan.

Hari jadinya sebagai kota Pekanbaru ini yaitu pada tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu", seiring dalam bahasa sehari-hari dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu" disebut Pekanbaru yang saat ini diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Kemudian dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan maka saat itu diperlukan perluasan wilayah yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ yang didalam peraturan ini jumlah kecamatannya yaitu 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Kemudian dengan memperhatikan jumlah dan kegiatan penduduk, dan luas wilayah potensi ekonomi, sosial budaya, sosial maka berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 jumlah kecamatan kota pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Kemudian hingga saat ini pada tahun 2020 kota pekanbaru tetap memiliki 12 kecamatan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 sedangkan jumlahnya bertambah 25 kelurahan yang sebelumnya hanya 58 kelurahan sudah menjadi 83 kelurahan.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah kumpulan individu yang menempati disuatu wilayah daerah tertentu sebagai tempat tinggalnya yang menjadi faktor pembangunan disuatu wilayah dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya, maka untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan

perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerahnya dalam bentuk dokumen yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam jangka 20 tahun kedepan sebagai dasar bagi para calon yang akan memimpin dalam membangun suatu daerahnya kedepannya sesuai dengan amanat peraturan daerahnya.

Perencanaan pembangunan daerah kota Pekanbaru ini tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 yang visi pembangunannya adalah :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”

Dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu Walikota dan wakil waliota Kota Pekanbaru untuk periode 5 tahun kepemimpinannya yaitu tahun 2017-2022 dengan mempertimbangkan tahap pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu dalam RPJMD dengan menekankan tentang visi dan misi sebagai tolak ukur kinerja kepala daerah yang terpilih sehingga dapat mengukur keberhasilan pembangunan, Visi dan misi walikota dan wakil walikota yang terpilih yaitu **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

Dalam hal ini pembangunan akan lebih baik dan terarah jika pelaksanaannya dilaksanakan dengan tepat sesuai visi dan misinya sehingga dapat mewujudkan kota pekanbaru sebagai :

Smart City adalah sebagai kota Pintar atau kota cerdas dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya yang didalamnya terdapat terdapat 6 pilar yang perlu dan wajib dimiliki sebuah pemerintah kota Pekanbaru dalam mewujudkan kota yang smart yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (ekonomi pintar), *Smart Mobility* (mobilitas pintar), *Smart People* (masyarakat pintar), dan *Smart Live* (hidup pintar).

Madani, adalah Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Kemudian untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan kota pekanbaru 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan berdaya saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang baik
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan Yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Seiring dengan berkembangnya kota pekanbaru ini yang begitu pesat mengakibatkan pada peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk karna kota pekanbaru ini kota yang sangat strategis dan menjadi kota tujuan dalam berdagang dan untuk menetap dan tinggal yang sebagian besar penduduknya pendatang, oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru harus tanggap dan serius dalam menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dengan pendataan warga, penyediaan infrastruktur yang baik yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yg

baik disektor kesehatan, tempat Ibadan pendidikan, lingkungan perkotaan yang baik sesuai dengan visi misi pembangunan kota pekanbaru yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel IV.I Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru/Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tampan	59,81	307.947	5.149
2	Payung Sekaki	43,24	91.255	2.110
3	Bukit Raya	22,05	105.177	4.770
4	Marpoyan Damai	29,74	131.550	4.423
5	Tenayan Raya	171,27	167.929	980
6	Lima Puluh	4,04	41.466	10.264
7	Sail	3,26	21.492	6.593
8	Pekanbaru Kota	2,26	25.103	11.108
9	Sukajadi	3,76	47.420	12.612
10	Senapelan	6,65	36.581	5.501
11	Rumbai	128,85	67.654	525
12	Rumbai Pesisir	157,33	73.784	468
Jumlah		632,26	1.117.358	1.767

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2019, BPS Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan perkecamatan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak atau terbesar berada pada Kecamatan Tampan yaitu 307.947 jiwa dengan kepadatan penduduknya adalah 5.149 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil atau terendah berada pada Kecamatan Sail yaitu 21.492 jiwa dengan kepadatan penduduknya adalah 6.593 jiwa.

Kemudian untuk melihat jumlah penduduk kota pekanbaru menurut jenis kelamin/ kecamatan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel IV.II Daftar Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin/Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tampan	158.195	149.752	307.947
2	Payung Sekaki	46.631	44.624	91.255
3	Bukit Raya	54.485	50.692	105.177
4	Marpoyan Damai	68.167	63.383	131.550
5	Tenayan Raya	86.620	81.309	167.929
6	Lima Puluh	20.626	20.840	41.466
7	Sail	10.727	10.765	21.492
8	Pekanbaru Kota	12.712	12.391	25.103
9	Sukajadi	23.541	23.879	47.420
10	Senapelan	18.144	18.437	36.581
11	Rumbai	35.398	32.256	67.654
12	Rumbai Pesisir	38.000	35.784	73.784
Jumlah		573.246	544.112	1.117.358

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2019, BPS Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan perkecamatan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah jenis kelamin laki-lakinya berjumlah 573.246 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuannya berjumlah 544.112. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi jumlah penduduk terbanyak atau terbesar menurut jenis kelamin yaitu penduduk laki-lakinya dengan jumlah 573.246 jiwa.

Secara umum Suku yang menetap di kota pekanbaru ini aslinya adalah suku Melayu, namun sebagiannya ada suku batak, suku jawa, suku minang dan sebagainya serta mata pencahariannya masyarakat kota pekanbaru ini ialah pegawai dan pedagang.

Kemudian untuk melihat daftar nama kelurahan yang ada di kota Pekanbaru saat ini tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Daftar Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru 2020

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan		Jumlah Kelurahan
1	2	3		4
1	Tampan	1. Simpang Baru 2. Sidomulyo Barat 3. Tuah Karya 4. Delima 5. Tuah Madani	6. Sialang Munggu 7. Tobek Godang 8. BinaWidya 9. Air Putih	9
2	Payung Sekaki	1. Labuh Baru Timur 2. Tampan 3. Air Hitam 4. Labuh Baru Hitam	5. Bandar Raya 6. Sungai Sibam 7. Tirta Siak	7
3	Bukit Raya	1. Simpang Tiga 2. Tangkerang Selatan 3. Tangkerang Utara	4. Tangkerang Labuai 5. Air Dingin	5
4	Marpoyan Damai	1. Tangkerang Tengah 2. Tangkerang Barat 3. Maharatu	4. Sidomulyo Timur 5. Wonorejo 6. Perhentian Marpoyan	6
5	Tenayan Raya	1. Kulim 2. Tangkerang Timur 3. Rejosari 4. Bencah Lesung 5. Sialang Rampai 6. Pebatuan 7. Mentangor	8. Pematang Kapau 9. Sialang Sakti 10. Tuah Negeri 11. Melebung 12. Industri Tenayan 13. Bambu Kuning	13
6	Lima Puluh	1. Rintis 2. Sekip	3. Tanjung Rhu 4. Pesisir	4
7	Sail	1. Cinta Raja 2. Suka Maju	3. Suka Mulya	3
8	Pekanbaru Kota	1. Simpang Empat 2. Sumahilang 3. Tanah Datar	4. Kota Baru 5. Suka Ramai 6. Kota Tinggi	6
9	Sukajadi	1. Jadi Rejo 2. Kampung Tengah 3. Kampung Melayu 4. Kedung Sari	5. Harjosari 6. Sukajadi 7. Pulau Karomah	7
10	Senapelan	1. Padang Bulan 2. Padang Terubuk 3. Sago	4. Kampung Dalam 5. Kampung Bandar	6

			6. Kampung Baru	
11	Rumbai	1. Umban Sari 2. Rumbai Bukit 3. Muara Fajar Timur 4. Palas 5. Sri Meranti	6. Agrowisata 7. Maharani 8. Rantau Panjang 9. Muara Fajar Barat	9
12	Rumbai Pesisir	1. Meranti Pandak 2. Limbungan 3. Lembah Sari 4. Lembah Damai 5. Limbungan Baru	6. Tebing Tinggi Okura 7. Sungai Ambang 8. Sungai Ukai	8
Jumlah				83

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2020, BPS Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan terdapat 12 kecamatan yaitu Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya Lima Puluh Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir dengan jumlah keseluruhan kelurahan kota pekanbaru hingga saat ini 83 kelurahan.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

a. Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum yang Mantap untuk mendukung Kota Pekanbaru Menuju Smart City Yang Madani.

b. Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

- Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara Efektif dan Efisien guna mencapai kelancaran pembangunan.

- Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang handal untuk menjangkau daerah terpencil, daerah potensi dan mendukung kawasan cepat tumbuh.
- Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serata normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir.

2. Falsafah kerja Pemerintah Kota Pekanbaru

1. Dimensi Akhlak yaitu Profesional, Amanah dan Santun (PAS).
2. Dimensi Karakter yaitu Disiplin, Kreatif dan Inovatif (DKI).
3. Dimensi Kualitas yaitu Mampu dan mau bekerja keras, Bergerak cepat dan bertindak tepat dan tuntas (MB2)

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

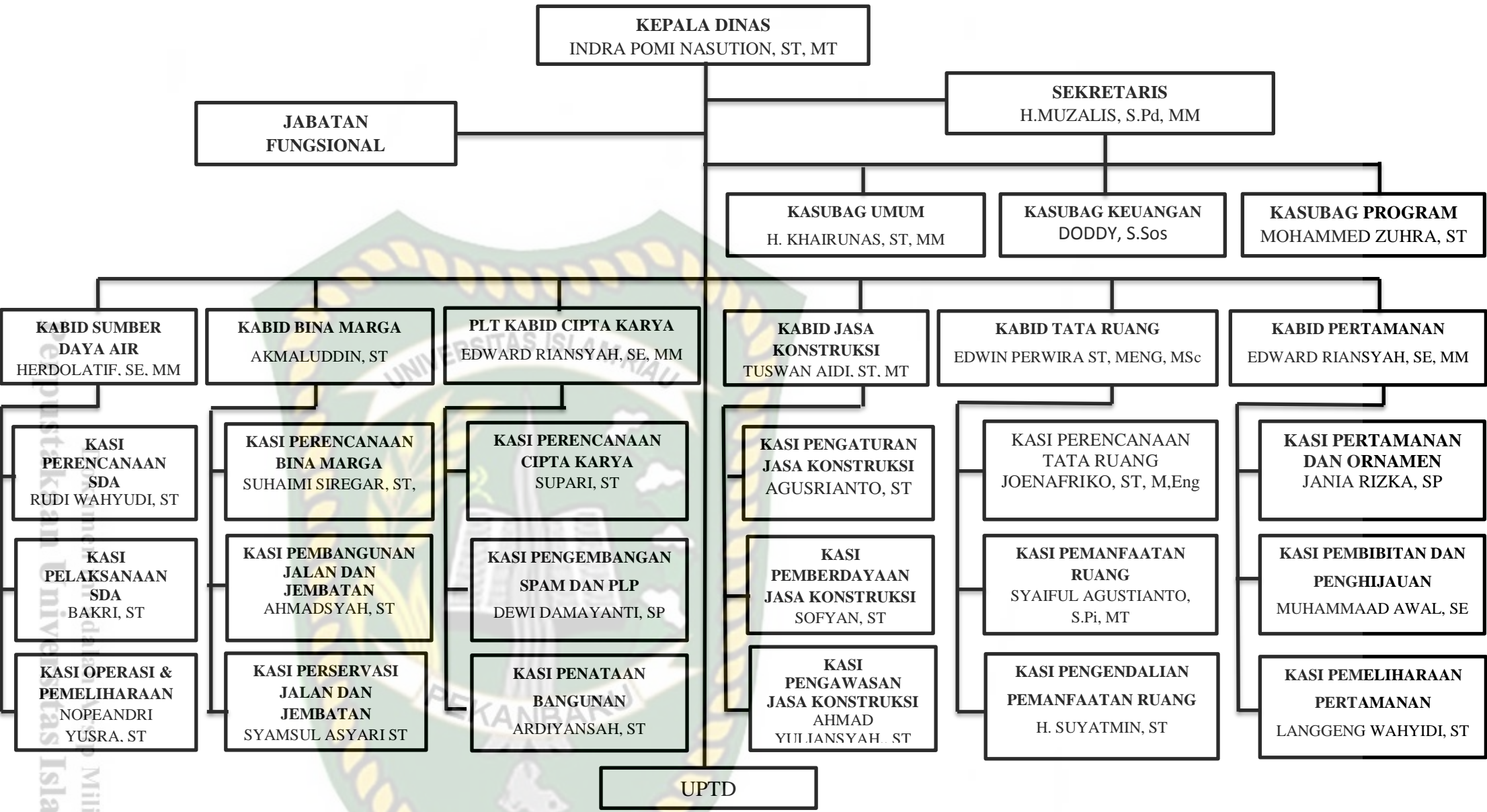
Dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang membantu walikota dalam melaksanakan pembangunan sesuai visi dan misi pembangunan oleh kepala daerah yang terpilih saat ini tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dalam Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:

11. Kepala Dinas.
12. Sekretariat, membawahi:
 4. Sub Bagian Umum.
 5. Sub Bagian Keuangan.
 6. Sub Bagian Program.
13. Bidang Sumber Daya Air, membawahi
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 3. Seksi Operasi Dan pemeliharaan Sumber Daya Air.
4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 4. Seksi Perencanaan Bina Marga.
 5. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan.
 6. Seksi preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi
 4. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
 5. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
 6. Seksi Penataan Bangunan.
6. Bidang Jasa Kontruksi, membawahi:
 4. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
 5. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 6. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
7. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 4. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 5. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 6. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bidang Pertamanan dan Ornamen.
 4. Seksi Pertamanan dan Ornamen.
 5. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 6. Seksi Pemeliharaan dan pertamanan.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.I : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada bab ini dalam pelaksanaan hasil penelitian sebagai keseluruhan individu pada responden yang terpilih yang digunakan sebagai sampel dengan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan tanggapan responden yang telah disebarkan kepada responden dengan penyebaran kuisioner mengenai Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru. Identitas responden ini berguna untuk memberikan informasi dan dapat memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data dalam proses penelitian dalam tabel yang disajikan mengenai responden yang meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan

1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin pada lokasi penelitian ini di Dinas Pekerjaan Umum Dan Peantaaan Ruang Kota Pekanbaru yaitu terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang dalam suatu permasalahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini tentulah berbeda. Dan dari segi kebiasaan laki-laki lebih kewibawa, bijaksana dan cepat dalam mengambil keputusan disbanding perempuan. Berikut tabel untuk melihat jenis kelamin responden penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.I : Jenis Kelamin Responden Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	6	55%
2	Perempuan	5	45%
Jumlah		11	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari Tabel diatas berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah responden Unsur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru lebih banyak Laki-laki berjumlah 6 orang atau sama dengan 55% sedangkan Perempuan berjumlah 5 orang atau sama dengan 45%.

Tabel V.II : Jenis Kelamin Responden Masyarakat

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	13	65%
2	Perempuan	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Dari Tabel diatas berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah responden Masyarakat lebih banyak Laki-laki berjumlah 13 orang atau sama dengan 65% sedangkan Perempuan berjumlah 7 orang atau sama dengan 35%.

2. Umur Responden

Umur adalah usia individu yang merupakan hal yang penting yang dapat diukur dalam menentukan kemampuan dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambahnya umur maka dalam proses perkembangan mentalnya dan tingkat kematangan dalam berfikir setiap individu itu akan lebih baik dan lebih dewasa serta hal ini dapat mempengaruhi pada daya ingat seseorang dan pengetahuan yang ia dapatkan atau diperolehnya. Dalam

pelaksanaan penelitian ini yang berdasarkan dari segi umur maka kemampuan dalam berfikir dan berkerja setiap individu atau setiap seseorang pastilah berbeda yang dapat dilihat dari segi pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya atau peran yang dijalakannya maka semakin banyak pula mengetahui permasalahan yang terjadi sekitar lingkungan kerjanya dan menjadikan suatu hal menjadi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.III : Tingkatan Umur Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

No	Tingkat Umur	Responden	Persentase
1	20-25	1	9%
2	26-30	1	9%
3	31-35	7	64%
4	36-40	1	9%
5	41-45	1	9%
6	45 Keatas	0	0
Jumlah		11	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dari penelitian ini dalam memberikan informasi tentang tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait tentang drainase paling banyak terlihat pada umur 31-35 dengan jumlah 7 orang atau sama dengan 64% sedangkan umur 20-25 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 9%, kemudian umur 26-30 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 9%, kemudian umur 36-40 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 9%, dan untuk umur 41-45 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 9%.

Tabel V.IV : Tingkatan Umur Masyarakat

No	Tingkat Umur	Responden	Persentase
1	20-25	3	15%
2	26-30	2	10%
3	31-35	6	30%
4	36-40	7	35%
5	41-45	1	5%
6	45 Keatas	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dari penelitian ini dalam memberikan informasi tentang tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait tentang drainase paling banyak terlihat pada umur 36-40 dengan jumlah 7 orang atau sama dengan 35% sedangkan umur 31-35 dengan jumlah 6 orang atau sama dengan 30%, untuk umur 20-25 dengan jumlah 3 orang atau sama dengan 15%, untuk umur 26-30 dengan jumlah 2 orang atau sama dengan 10% sedangkan umur 41-45 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 5%, dan umur 45 keatas dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 5%,

3. Pendidikan Responden

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang dapat berguna untuk mengembangkan kemampuan kepribadian seseorang dan meningkatkan kualitas dirinya dalam memahami pengetahuan yang diperoleh sehingga mampu mengambil keputusan. Dalam Penelitian ini terdapat pembagian tingkatan pendidikan formal sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.V : Tingkatan Pendidikan Responden Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	0	0%
4	DIPLOMA	0	0%
5	STRATA 1	10	91%
6	STRATA 2	1	9%
JUMLAH		11	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan responden paling banyak atau paling dominan pendidikannya adalah Strata 1 (S1) berjumlah 10 orang dengan persentase 91 % sedangkan yang pendidikannya Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang dengan persentasenya 9%.

Tabel V.VI : Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	6	30%
3	SMA	11	55%
4	DIPLOMA	2	10%
5	STRATA 1	1	5%
6	STRATA 2	0	0%
JUMLAH		20	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan responden paling banyak atau paling dominan pendidikannya adalah SMA berjumlah 11 orang dengan persentase 55%, untuk yang pendidikannya SMP berjumlah 6 orang dengan persentasenya 30%, untuk pendidikannya Diploma dengan jumlah 2 orang atau sama dengan 10%, untuk pendidikannya Strata 1 dengan jumlah 1 orang atau sama dengan 5%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

Pada sebuah Organisasi tentunya memiliki aturan yang penting digunakan untuk melaksanakan tugasnya yang didalamnya terdapat pembagian kerja atau tugas yang tersusun dalam menjalankan sesuatu fungsi tertentu dalam menyelenggarakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab berorganisasi dengan menjalankan sesuatu fungsi tertentu dalam hubungan kerja sama yang terjalin secara terstruktur dengan jelas dan lengkap yang berguna untuk mempermudah melakukan dalam mencapai kepentingan dan tujuan bersama, oleh karena itu untuk dapat mengetahui keberhasilan dari tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh kepala dinas untuk membantu kepala daerah yaitu walikota pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

1. Indikator Efektivitas

Efektivitas adalah suatu pencapaian yang dilakukan dengan melakukan metode-metode yang telah ditetapkan secara tepat dan benar serta terarah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah direncanakan atau telah dibuat. Dan apakah hasil atau target yang diharapkan telah tercapai sehingga menentukan tingkat keberhasilan yang berkualitas dalam mencapai tujuan.

Tabel V.VII: Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan penanganan genangan air	1 (9%)	10 (91%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Penyusun Program Perbaikan Drainase	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (100%)
3	Pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik	4 (36%)	7 (64%)	0 (0%)	11 (100%)
Jumlah		16	17	0	33
Rata-Rata		5.3	5.7	0	11
Persentase		48%	52%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.VII diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan “Baik” sebanyak 1 orang dengan persentase 9 %, sedangkan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 10 orang dengan persentase 91%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikam tanggapan untuk kategori “Baik”

sebanyak 11 orang dengan persentase 100%. Dan untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 36%, sedangkan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 7 orang dengan persentase 64 %. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.3 dan persentasenya adalah 48%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.7 dan persentasenya adalah 52%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Efektivitas bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sudah melakukan perencanaan dalam penanganan saluran drainase agar tidak adanya genangan air di kota pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa :

“Banjir menjadi Fokus Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk mengatasinya, dilakukan secara bertahap untuk mengurangi adanya genangan, namun belum optimal, dari lebih 60 titik saat ini ada atau tinggal 39 titik banjir, sehingga untuk mengatasinya diperlukan DED Drainase perkotaan yang lebih Komprehensif untuk dapat mengatasi banjir/genangan yang terjadi di Kota Pekanbaru”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan: apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah ada menyusun program perbaikan pada saluran drainase agar tidak adanya genangan air disepanjang ruas jalan?

Ia mengatakan bahwa :

“Pada Dinas PUPR Kota Pekanbaru ini sebagai instansi teknis, dalam program perbaikan drainase sudah ada dan ditinggalkan untuk bidang Bina Marga ini dimasukkan dalam program Rehabilitasi Rutin Jalan yaitu jika ada alirannya yang tersumbat pada saluran drainase yang ada maka saat ini dilakukan pembersihan dengan melakukan pengerukan atau sedimentasi agar alirannya lancar.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan: apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru sudah mengendalikan agar tidak adanya genangan air di kota Pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa

“Dengan mengendalikan pelaksanaan perencanaan teknik dalam penanganannya, yang dilakukan saat ini dalam mengatasi agar tidak adanya genangan dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan menyusun rencana untuk kedepannya yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan upaya penanganan dengan menganggarkan yaitu anggaran operasional pembersihan-pembersihan dalam bidang bina marga yaitu program Rehabilitasi Rutin Jalan dan pada bidang SDA sedang membuat DED penanganan Banjir”

Kemudian untuk melengkapi jawaban penulis memberikan quisioner kepada pegawai bidang SDA pada bagian staff perencanaan Sumber Daya Air dengan menyimpulkannya terkait DED penangan banjir/genangan pada Bidang SDA, indikator Efektifitas yang membahas penanganan genangan air pada tanggal 24 Juli 2020. Dengan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

Pada bidang SDA sedang menyusun Masterplan atau rencana induk yang sebagai Pengendali banjir atau penanganan banjir kota Pekanbaru. Dan penanganan yang dilakukan saat ini pada aliran sungai agar air yang ada tidak meluap ke permukaan dengan melakukan normalisasi anak sungai. Masterplan drainase atau Rencana Induk ini masih tahap penyusunan sebagai pedoman dalam penanganan banjir atau sebagai perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, untuk itu untuk mengatasinya agar tidak adanya genangan dilakukan perlu disesuaikan pada suatu daerah perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang kota atau perencanaan dengan memperhatikan rencana pengembangan kota Pekanbaru”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, dan berdasarkan data genangan yang didapatkan bahwa memang masih adanya beberapa titik banjir yang menggenangi ruas jalan yang ada dikota pekanbaru ketika hujan deras tiba akibat adanya drainase yang tersumbat. Namun berdasarkan hasil wawancara bahwa dinas telah mengatasi banjir dengan cara mengurangi adanya genangan, namun peneliti tidak mengetahui apakah dinas tersebut penanganan yang dilakukan melakukan skala prioritas pada daerah yang terjadinya rawan banjir karna peneliti tidak mendapatkan data genangan sebelumnya sebagai perbandingan dengan data yang penulis dapatkan. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.VII tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Efektivitas dinilai Cukup Baik dengan persentase 52% dan jumlah responden 11 orang.

2. Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah sejumlah usaha dalam memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar tercapainya sebuah pencapaian hasil efektivitas tertinggi dengan biaya seminimal mungkin, atau seberapa jauh upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dalam meningkatkan efektivitas tertentu, dalam hal ini efektifitas dan efisiensi saling berhubungan karna efisiensi itu ke bagaimana penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan.

Tabel V.VIII: Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembentukan Tim Kerja Penanganan	9 (82%)	2 (18%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Ketersediaan anggaran perbaikan drainase	5 (45%)	6 (55%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Upaya Dinas memperbaiki drainase	2 (18%)	9 (82%)	0 (0%)	11 (100%)
Jumlah		16	17	0	33
Rata-Rata		5.3	5.7	0	11
Persentase		48%	52%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.VII diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 9 orang dengan persentase 82% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 45%, sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 55%. Dan untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 9 orang dengan persentase 82%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.3 dan persentasenya

adalah 48%, untuk responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.7 dan persentasenya adalah 52 %.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Efisiensi bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apa upaya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam memperbaiki drainase?

Ia mengatakan bahwa :

“penanganan dilakukan saat Dinas PUPR saat ini hanya penanganan jangka pendek karna masterplan drainase belum rampung, yang penanganan yang dilakukan pada drainase jalan yang upayanya adalah dengan melakukan penanganan drainase yang tersumbat dengan cara pembersihan pada saluran drainase yang ada untuk mengurangi adanya titik-titik genangan sesuai anggaran yang ada, namun anggaran terbatas untuk skala kota pekanbaru karna masih banyaknya drainase yang tersumbat dan masih ditemukan masyarakat yang

menutup drainase jalan sehingga dapat menghalangi dalam proses pembersihan”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan sesuai pernyataan masyarakat, bahwa penanganan untuk mengatasinya adanya genangan hanya saat kejadian banjir cukup tinggi baru tim mereka datang untuk melakukan proses pengerjaan pembersihan saja yang dilakukan oleh tim baju warna kuning atau tim kuning dengan melakukan pembentukan tim kerja dilapangan dengan membagi tugas tiap drainase lalu melakukan proses pembersihan drainase. Pada drainase jalan sering timbul karna adanya sampah yang menyangkut atau tersumbat bangunan drainase yang ada menimbulkan penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik dan adanya yang menutup saluran drainase pada jalan penghubung masuk bangunan aliran airnya yang tertutup sehingga hujan tiba maka air yang ada di drainase meluap kepermukaan jalan yang mengganggu pengguna jalan yang melintas dan apalagi hujan yang cukup lama bahkan bisa masuk sampai keruko atau kedai. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.VIII tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Efektivitas dinilai Cukup Baik dengan persentase 52% dan jumlah responden 11 orang.

3. Indikator Kecukupan

Kecukupan adalah suatu hal yang dicapai pada tingkat efektifitas dimana tidak lebih maupun tidak kurang yang dapat memuaskan kebutuhan yang

menekankan pada kebijakan yang memadai dalam memaksimalkan pelaksanaan program.

Tabel V.IX : Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Hubungan kerjasama atasan dan bawahan	9 (82%)	2 (18%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Ketersediaan Fasilitas Peralatan	2 (18%)	9 (82%)	0 (0%)	11 (100%)
3	Pembangunan sesuai kapasitas daya tampung	4 (36%)	7 (64%)	0 (0%)	11 (100%)
Jumlah		15	18	0	33
Rata-Rata		5	6	0	11
Persentase		45%	55%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.IX diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 9 orang dengan persentase 82% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 9 orang dengan persentase 82%. Dan untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 36% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 7 orang dengan persentase 64%. Jadi dari tabel diatas

secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 5 dan persentasenya adalah 45%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 6 dan persentasenya adalah 55%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Kecukupan bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apakah ada fasilitas peralatan dalam melaksanakan kegiatan perbaikan drainase di kota Pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa :

“peralatan untuk penanganan drainase disesuaikan dengan anggaran yang ada, seperti molen yang untuk mengaduk semen untuk memperbaiki struktur drainase, excavator sebagai alat berat yang digunakan untuk penggalian drainase yang ada disisi jalan atau membersihkan endapan sampah pada drainase yang ukurannya besar seperti dikanal sungai namun saat ini lebih ke kegiatan yang dilakukan agar alirannya lancar dengan melakukan

pembersihan-pembersihan pada saluran drainase yang ada agar tidak tersumbat dengan menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan alat penunjangnya yaitu sekop, cangkul, gerobak dorong roda satu, ember, penggaruk untuk mengangkat sampah dari badan saluran, kemudian peralatan untuk keselamatan tim kerja seperti helm, sepatu boots dan sarung tangan.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah pembangunan saluran drainase jalan sesuai dengan kapasitas daya tampung yang dibutuhkan?

Ia mengatakan bahwa :

“Saya merasa bangunan saluran drainase harus terus berjalan, dan untuk saluran drainase di badan jalan sudah cukup untuk penanganan badan jalan karna sebelum kita bangun itu tentu disesuaikan dengan pedoman yang ada untuk membangunnya dan untuk itu bangunan yang telah ada saat ini maka perlu adanya perawatan pada saluran drainase yang ada.”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis melihat bahwa bangunan drainase jalan memang sudah cukup untuk penanganan jalan. Untuk itu bangunan drainase jalan yang ada perlu meningkatkan perawatan lebih lagi agar bangunan drainase tidak ada yang tersumbat. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.IX tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Efektivitas dinilai Cukup Baik. dengan persentase 55% dengan jumlah responden 11 orang.

Tabel V.X : Penelitian Responden Unsur Masyarakat Mengenai Kecukupan Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Hubungan Kerjasama atasan dan bawahan	5 (25%)	12 (60%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Ketersediaan Fasilitas Peralatan	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Pembangunan sesuai kapasitas daya tampung	2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		9	39	12	60
Rata-Rata		3	13	4	20
Persentase		15%	65%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.X diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 20 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 25%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 3 orang dengan persentase 15%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 14 orang dengan persentase 70%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 13 orang dengan persentase 65%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 25%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden

yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 3 dan persentasenya adalah 15%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 13 dengan persentase 65%, dan untuk tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya adalah 4 dan persentasenya adalah 20%.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat, bahwa hasil kuisioner dan tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “**Cukup Baik**” dengan alasan yang diberikan oleh responden terkait jawaban yang diberikan diatas yang dapat ditarik kesimpulan pada unsur masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah cukup baik pelaksanaannya dalam menangani banjir atau genangan air saat kejadian, dan bangunan yang ada sudah cukup sesuai untuk penanganan jalan namun perlu ditingkatkan lagi pada bangunan drainase yang ada di kota pekanbaru seperti JL.Srikandi untuk menambah sisi penyangga karna tahun lalu ada kejadian daerah aliran air disitu mobil terseret akibat hujan lebat air yang ada pada saluran air sungai itu meluap ke permukaan jalan, dan pada JL.Lobak depan smk muhamadiyah itu drainase yang untuk aliran sungai konstruksi bangunannya mempersempit aliran sungai dan tahun lalu ada kejadian pada saat hujan lebat/deras tiba sekitar lebih dari 1 jam-an saja air yang ada di drainase itu meluap yang lama genangannya sekitar 6 jam-an. Dan masyarakat menilai drainase yang ada karna belum sepenuhnya melakukan pembersihan pada saluran drainase yang ada sehingga kapasitas saluran makin hari makin menurun akibat penyumbatan sampah yang ada pada saluran drainase seperti di jalan HR.Soebrantas simapang Tabek Gadang banjir yang terjadi timbul dari meluapnya air pada saluran drainase

yang ada bahkan sesuai pernyataan masyarakat jika hujan deras atau intensitas yang cukup lama genangan dapat masuk ke dalam bangunan ruko sekitaran daerah tersebut yaitu simpang jl.kutilang sakti menuju lampu merah simpang tabek gadang JL.HR.Soebrantas yang pernah kejadian lamanya hujan sekitar 1-2 jam-an sudah tergenang yang lamanya sekitar 6 jam-an. Dan pada masyarakat Jl. Garuda Sakti bahwa pada tahun lalu ada proses pembangunan drainase di jalan tersebut sudah cukup untuk penanganan jalan namun penyebab genangan yang terjadi pada Jl.Garuda sakti juga masih adanya tumpukan sampah pada saluran drainase jalannya serta pada JL.Sukakarya masih adanya bangunan yang tidak memiliki drainase dan masih banyaknya sampah.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan sesuai pernyataan masyarakat, bahwa benar bangunan drainase jalan saat ini sudah cukup untuk penanganan jalan, namun perlu penanganan lebih baik lagi pada bangunan drainase yang ada agar berfungsi dengan baik agar saluran drainase yang ada fungsinya tidak menurun akibat penyumbatan sampah. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil analisis quisioner masyarakat dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.X dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Perataan dinilai Cukup Baik. dengan persentase 65% dengan jumlah responden 20 orang.

4. Indikator Perataan

Dalam Dunn perataan ini menyebutkan yaitu kriteria kesamaan yang berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Dalam

hal ini perataan adalah keadaan sosial dengan konsep keadilan bersama secara menyeluruh yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha agar suatu program tertentu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu yang dalam kebijakan publik memiliki arti keadilan.

Tabel V.XI : Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemantauan kondisi drainase	7 (64%)	4 (36%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Pemeliharaan Drainase	3 (27%)	8 (73%)	0 (0%)	11 (100%)
3	Perbaikan Saluran Drainase berada dikanan dan kiri jalan	6 (55%)	5 (45%)	0 (0%)	11 (100%)
Jumlah		16	17	0	33
Rata-Rata		5.3	5.7	0	11
Persentase		48%	52%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XI diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 7 orang dengan persentase 64% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 36%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 3 orang dengan persentase 27% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 8 orang dengan persentase 73%. Dan

untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 55% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 45%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.3 dan persentasenya adalah 48%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.7 dan persentasenya adalah 52%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Perataan bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melaksanakan pemeliharaan terhadap kondisi drainase di kota Pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemelihraan dilakukan saat ini dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan pada saluran drainase yang ada dengan melakukan pembersihan-pembersihan pada drainase yang dilakukan berdasarkan

tingkat urgennya yang sifatnya incidental yaitu dilakukan belum secara tetap atau rutin hanya saat kejadian mendesak karna disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu anggaran operasi pembersihan, namun karna anggaran yang terbatas untuk secara keseluruhan kota pekanbaru dan tim kerja disesuaikan dengan kondisi dilapangan lebih kurang 40 orang untuk melakukan pembersihan-pembersihan pada saluran yang ada agar aliran airnya tidak tersumbat tentu belum sepenuhnya tercapai. Drainase untuk Bidang Bina Marga pada drainase jalan sebagai penangananan jalan untuk melindungi struktur konstruksi jalan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh bagian perservasi jalan dan jembatan agar perkerasan jalan tidak rusak yang disebabkan yang salah satunya genangan yang dapat mengikis struktur perkerasan jalan atau badan jalan. Dan untuk bagian pemeliharaan pada bidang Sumber Daya Air pada drainase perkotaan dilaksanakan oleh bagian Operasional dan Pemeliharaan.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan dalam perbaikan saluran air agar tidak adanya genangan?

Ia mengatakan bahwa :

“Dalam memperbaiki terhadap kerusakan saluran drainase yang ada dengan menurunkan tim untuk memantau kerusakan yang terjadi yang timbul adanya genangan ya karna salurannya tersumbat dengan melakukan pembersihan dan adanya saluran drainase yang tertutup oleh bangunan aliran airnya yang tertutup sehingga air badan jalan tidak masuk ke drainase makanya

tergenang yang dilakukan dengan membobok jalan masuk penutup permukaan tadi harus dibuka, namun saat ini pelaksanaan yang dilakukan lebih kepada pembersihan-pembersihan terutama sedimentasi/sampah dengan melakukan pengerukan yang ada disaluran drainase yaitu sedimen/sampah yang mengendap yang ada pada saluran drainase digali dan diangkat keatas atau tepi saluran dengan menggunakan tenaga manusia yang alat penunjangnya yaitu cangkul dan sekop setelah diangkat sampah tadi baru melakukan pengerukan. Pekerjaan perbaikan drainase bukan pekerjaan yang sederhana karna dalam pengerjaan drainase diperlukan perencanaan detail karna ini sangat mempengaruhi terhadap kelestarian lingkungan”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan sesuai pernyataan masyarakat, bahwa penanganan yang dilakukan hanya saat kejadian banjir/.genangan yang cukup tinggi baru mereka tiba dan melakukan proses pengerjaan, hal ini juga diakui oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang seperti kata bapak suheimi diatas yang mengatakan pembersihan yang dilakukan berdasarkan tingkat urgentya (mendesak) yaitu hanya bersifat incidental yaitu dilakukan belum secara tetap atau rutin namun hanya pada waktu kejadian atau waktu mendesak sesuai anggaran yg ada. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.XI tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Perataan dinilai Cukup Baik dengan persentase 52% dan jumlah responden 11 orang.

Tabel V.XII : Penelitian Responden Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Perataan.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemantauan Kondisi Drainase	2 (10%)	15 (75%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Pemeliharaan Drainase	2 (10%)	12 (60%)	6 (30%)	20 (100%)
3	Perbaikan Saluran Drainase berada dikanan dan kiri jalan	2 (10%)	12 (60%)	6 (30%)	20 (100%)
Jumlah		6	39	15	60
Rata-Rata		2	13	5	20
Persentase		10%	65%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XI diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 20 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 15 orang dengan persentase 75%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 3 orang dengan persentase 15%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden

yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 2 dan persentasenya adalah 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 13 dengan persentase 65%, dan untuk tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya adalah 5 dan persentasenya adalah 25%.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat, bahwa hasil kuisioner dan tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “**Cukup Baik**” dengan alasan yang diberikan oleh responden terkait jawaban yang diberikan diatas yang dapat ditarik kesimpulan pada unsur masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah cukup baik pelaksanaannya yaitu penanganan yang dilakukan hanya saat kejadian banjir/genangan yang cukup tinggi baru mereka tiba dan melakukan proses pengerjaan dengan melakukan pengerukan pada drainase yang timbul adanya genangan.

Sedangkan hasil berdasarkan observasi dilapangan penulis yang sesuai dengan pernyataan masyarakat, bahwa pelaksanaan penanganan terhadap kondisi drainase dilapangan perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi tidak hanya ketika kejadian banjir agar drainase yang ada itu dalam menampung dan mengalirkan air hujan itu berfungsi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil analisis quisioner masyarakat dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.XII tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Perataan dinilai Cukup Baik dengan persentase 65% dan jumlah responden 20 orang.

5. Indikator Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dari suatu kegiatan untuk mengenal dan merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan sasaran kebijakan publik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan program-program yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel V.XII : Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi kepada masyarakat	1 (9%)	5 (45.5%)	5 (45.5%)	11 (100%)
2	Keluhan masyarakat	6 (55%)	5 (45%)	0 (0%)	11 (100%)
3	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	7 (64%)	4 (37%)	0 (0%)	11 (100%)
Jumlah		14	14	5	33
Rata-Rata		4.7	4.7	1.7	11
Persentase		42.4%	42.4%	15.2%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XII diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 45.5%. sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 45.5%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 55% sedangkan tanggapan

untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 45%. Dan untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 7 orang dengan persentase 64% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 37%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 4.7 dan persentasenya adalah 42.4%, responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 4.7 dan persentasenya adalah 42.4%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya 1.7 dan persentasenya 15.2 %

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Responsivitas bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga drainase dan kondisi drainase yang ada di kota Pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat itu tidak ada, yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru lebih ke tim teknis, menangani kerusakan/perbaikan terutama pembersihan-pembersihan pada sedimentasi/sampah.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : apakah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Merespon dan menindaklanjuti secara keseluruhan adanya laporan atau keluhan masyarakat mengenai permasalahan kondisi drainase yang ada di kota Pekanbaru?

Ia mengatakan bahwa :

“Semua Laporan diterima, diprogramkan dan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim pemantau untuk melihat kondisi, kemudian masuk diprogramkan untuk dilaksanakan tergantung pada anggaran yang tersedia dengan menurunkan tim yang telah dibentuk langsung turun ke lokasi”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan sesuai pernyataan masyarakat, dan sesuai pernyataan pak suheimi bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat itu tidak ada dan sesuai pernyataan masyarakat penanganan yang dilakukan sudah cukup baik dalam menangani drainase yang tersumbat dengan menurunkan tim dan melakukan proses pengerjaan. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.XIII tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembahasan indikator Responsivitas dinilai Cukup Baik dengan persentase 42.4% dan jumlah responden 11 orang.

Tabel V.XIV Penelitian Responden Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Responsivitas

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi Kepada Masyarakat	2 (10%)	8 (40%)	10 (50%)	20 (100%)
2	Keluhan Masyarakat	5 (25%)	11 (55%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Menindaklanjuti pengaduan	5 (25%)	11 (55%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		12	30	18	60
Rata-Rata		4	10	6	20
Persentase		20%	50%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XIV diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 20 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 10%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 8 orang dengan persentase 40%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 10 orang dengan persentase 50%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 25%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 11 orang dengan persentase 55%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 25%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 11 orang dengan persentase

55%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 4 dan persentasenya adalah 20%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 10 dengan persentase 50%, dan untuk tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya adalah 6 dan persentasenya adalah 30%.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat, bahwa hasil kuisioner dan tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” dengan alasan yang diberikan oleh responden terkait jawaban yang diberikan diatas dapat ditarik kesimpulan pada unsur masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bahwa sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat tidak ada, dan dalam menindaklanjuti genangan air hanya saat kejadian banjir yang cukup tinggi dengan membentuk tim lalu melaksanakan proses pengerjaan. Banjir yang timbul biasanya intensitas hujan yang cukup besar sehingga air yang ada didrainase yang tersumbat itu meluap.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan sesuai pernyataan masyarakat, dan sesuai pernyataan pak suheimi bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat itu tidak ada, dan sesuai pernyataan masyarakat penanganan yang dilakukan sudah cukup baik dalam menangani drainase yang tersumbat dengan menurunkan tim dan melakukan proses pengerjaan. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil analisis quisioner

masyarakat dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.XIV tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan indikator Responsivitas dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dan jumlah responden 20 orang.

6. Indikator Ketepatan

Ketepatan ketepatan merupakan kemampuan menilai tujuan program untuk mengarahkan sejumlah alternative yang disarankan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuannya sehingga dapat diterapkan secara terarah.

Tabel V.XV : Penelitian Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kinerja dalam perbaikan drainase	4 (36%)	7 (64%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Pelaksanaan terkait koreksi drainase yang mengalami genangan air	9 (82%)	2 (18%)	0 (0%)	11 (100%)
3	Pengevaluasi kapasitas saluran	2 (18%)	8 (73%)	1 (9%)	11 (100%)
Jumlah		15	17	1	33
Rata-Rata		5	5.7	0.3	11
Persentase		45%	52%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XV diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 11 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 36%, tanggapan untuk

kategori “Cukup Baik” sebanyak 7 orang dengan persentase 64%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 9 orang dengan persentase 82% sedangkan tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Dan untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 2 orang dengan persentase 18%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 8 orang dengan persentase 73%, sedangkan tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 1 orang dengan persentase 9%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 5 dan persentasenya adalah 45%, responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 5.7 dan persentasenya adalah 52%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya 0.3 dan persentasenya 3%

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada indikator Responsivitas bahwa responden menilai Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru hasilnya adalah **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan Hasil wawancara yang diwakilkan oleh Bapak Suheimi Siregar S.T.,M.T selaku Kepala Seksi Perencanaa Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2020, peneliti mengajukan pertanyaan :

Apakah hasil kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan perbaikan drainase agar tidak adanya genangan? Ia mengatakan bahwa :

“Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir belum sepenuhnya tercapai, karna masih adanya titik-titik banjir dan saat ini untuk mengatasinya dengan melakukan upaya penanganan dalam mengatasi adanya banjir pada saluran drainase yang ada yang dalam penanganan yang dilakukan secara bertahap dengan melalui beberapa fase seperti melakukan kajian dahulu dengan menurunkan tim pemantau lalu kami mengumpulkan dan membentuk tim untuk menurunkannya di beberapa titik banjir lalu melakukan proses pengerjaan yang dilakukan dalam mengatasi titik-titik banjir atau genangan yang terjadi. Dalam hal ini penanganan yang dilakukan Dinas saat ini yaitu penanganan jangka pendek karna masterplan drainase belum rampung yang merupakan pedoman dasar dalam penanganan atau pengendalian banjir. Saat ini pada bidang Bina Marga pada drainase jalan untuk perlindungan jalan ini dengan melakukan pembersihan-pembersihan saluran drainase jalan yang tersumbat, namun masih banyak ditemui drainase yang mampet dan masih adanya jalan airnya itu saluran drainasenya tertutup sehingga dalam proses pengerjaan belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu dalam mengatasinya diperlukan DED (Detail Desain Drainase) yang komprehensif sebagai pedoman dasar dalam Penangan Banjir yang dibuat pada bidang SDA yaitu sedang membuat DED penanganan Banjir kedepannya namun terealisasinya belum sepenuhnya tercapai karna perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang kota atau

perencanaan dengan memperhatikan rencana pengembangan kota Pekanbaru, kemudian penyebabnya tenaga kerja yang terbatas yaitu tim pengerjaan untuk melakukan pembersihan dilapangan saat ini hanya berjumlah lebih kurang 40 orang untuk hal itu untuk skala kota pekanbaru belum sepenuhnya terpenuhi serta kepedulian masyarakat yang kurang untuk merawat dan menjaga drainase yang ada sehingga drainase yang ada cepat rusak dan ini menimbulkan kondisi drainase fungsinya menurun dalam menampung dan mengalirkan air hujan yang dapat menimbulkan banjir ketika hujan tiba.

Sedangkan berdasarkan observasi dilapangan sesuai pernyataan masyarakat, dan sesuai pernyataan pihak Dinas bahwa bahwa penangannan yang dilakukan belum merata itu karna adanya faktor penghambat seperti penjelasan diatas sehingga masih adanya titi-titik genangan air Di Kota Pekanbaru sehingga penanganan yang dilakukan saat ini dengan melakukan pembersihan drainase yang tersumbat hal ini menjadi penyebab hingga saat ini kota pekanbaru sering mengalami banjir yang saat ini belum sepenuhnya dapat memberi solusi dalam mengatasinya dengan tuntas.

Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil wawancara, dan observasi dan berdasarkan tabel V.XV tersebut disimpulkan bahwa pembahasan indikator Responsivitas dinilai Cukup Baik dengan persentase 52% dan responden 11 orang.

Tabel V.XVI : Penelitian Responden Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Ketepatan

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kinerja dalam perbaikan drainase	4 (20%)	12 (60%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan terkait koreksi drainase yang mengalami genangan air.	4 (20%)	11 (55%)	5 (25%)	20 (100%)
3	Pengevaluasi kapasitas saluran	1 (5%)	13 (65%)	6 (30%)	20 (100%)
Jumlah		9	36	15	60
Rata-Rata		3	12	5	20
Persentase		15%	60%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Tabel V.XVI diatas bahwa jawaban keseluruhannya adalah 20 Responden, kemudian untuk pertanyaan pertama dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 4 orang dengan persentase 20%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 11 orang dengan persentase 55%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 5 orang dengan persentase 25%. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dengan memberikan tanggapan untuk kategori “Baik” sebanyak 1 orang dengan persentase 5%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” sebanyak 13 orang dengan persentase 65%, dan untuk tanggapan untuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Jadi dari tabel diatas secara rata-rata dan persentase pada

jawaban responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Baik” dengan rata-ratanya adalah 3 dan persentasenya adalah 15%, tanggapan untuk kategori “Cukup Baik” dengan rata-ratanya adalah 12 dengan persentase 60%, dan untuk tanggapan pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-ratanya adalah 5 dan persentasenya adalah 25%.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat, bahwa hasil kuisioner dan tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “**Cukup Baik**” dengan alasan yang diberikan oleh responden terkait jawaban yang diberikan diatas dapat ditarik kesimpulan pada unsur masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah cukup baik kinerjanya pada saat kejadian banjir yang cukup tinggi baru melaksanakan proses pengerjaan, namun kegiatannya belum dilakukan secara merta hanya pengerjaan pada saluran drainase yang menjadi penyebab banjir itu belum dilakukan secara menyeluruh disekitar atau disepanjang drainase jalan yang dekat timbulnya banjir.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, sesuai pernyataan oleh key informan pak suheimi bahwa pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dengan melakukan upaya penanganan jangka pendek agar mengurangi adanya genangan dengan melakukan pembersihan pada drainase yang tersumbat agar alirannya lancar namun drainase yang ada masih ditemui yang banyak sampah dan masih adanya titik-titik banjir. Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil analisis quisioner masyarakat dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.XVI tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembahasan indikator Perataan dinilai Cukup Baik. dengan persentase 60% dengan jumlah responden 20 orang.

Tabel V.XVII : Rekapitulasi Responden Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dari hasil penelitian berjudul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	5.3 (48%)	5.7 (52%)	0 (0%)	11 (100%)
2	Efisiensi	5.3 (48%)	5.7 (52%)	0 (30%)	11 (100%)
3	Kecukupan	5 (45%)	6 (55%)	0 (0%)	11 (100%)
4	Perataan	5.3 (48%)	5.7 (52%)	0 (0%)	11 (100%)
5	Responsivitas	4.7 (42.4%)	4.7 (42.4%)	1.7 (15.2%)	11 (100%)
6	Ketepatan	5 (45%)	5.7 (52%)	0.3 (3%)	11 (100%)
Jumlah		30.6	33.5	2	66
Rata-Rata		5.1	5.6	0.3	11
Persentase		46%	51%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden pada kategori “Baik” rata-rata responden 5.1 atau jika dipersentasekan sebesar 46%, kategori “Cukup Baik” diketahui rata-rata responden 5.6 atau jika dipersentasekan sebesar 51%, kategori “Kurang Baik” diketahui rata-ratanya 0.3 atau jika dipersentasekan sebesar 3%.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.XVII pada indikator pertama Efektivitas responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 5.3 atau jika dipersentasekan sebesar 48%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 5.7 atau jika dipersentasekan sebesar 52%. Kemudian pada indikator kedua Efisiensi responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 5.3 atau jika dipersentasekan sebesar 48%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 5.7 atau jika dipersentasekan sebesar 52%. Kemudian pada indikator ketiga Kecukupan responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 5 atau jika dipersentasekan sebesar 45%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 6 atau jika dipersentasekan sebesar 55%. Kemudian pada indikator keempat Perataan responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 5.3 atau jika dipersentasekan sebesar 48%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 5.7 atau jika dipersentasekan sebesar 52%. Kemudian pada indikator kelima Responsivitas responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 4.7 atau jika dipersentasekan sebesar 42.4%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 4.7 atau jika dipersentasekan sebesar 42.4%. kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 1.7 atau jika dipersentasekan sebesar 15.2%. Kemudian pada indikator keenam Ketepatan responden responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 5 atau jika dipersentasekan sebesar 45%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 5.7 atau jika dipersentasekan sebesar 52%. kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 0.3 atau jika dipersentasekan sebesar 3%.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengatasi genangan air atau banjir agar tidak terjadinya genangan yang berlebihan yang salah satu penyebabnya yaitu permasalahan drainase timbul seiring pertumbuhan dan perkembangan perkotaan yang begitu pesat maraknya pembangunan sehingga drainase yang ada menimbulkan penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik dalam menampung dan mengalirkan air ketika hujan tiba sehingga air yang ada pada drainase itu meluap permukaan jalan yang disebabkan karna adanya drainase yang tertutup adanya yang menutup jalan air atau drainase yang tertutup dan adanya drainase yang tersumbat oleh sedimen atau sampah yang membuat alirannya tidak lancar atau mampet, untuk mengatasinya pihak Dinas mengatakan diperlukan DED (Detail Desain Drainase) yang komprehensif sebagai pedoman dalam penanganan banjir yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu masih tahap penyusunan masterplan atau rencana induk drainase yang dibuat oleh bidang Sumber Daya Air sebagai perencanaan dasar drainase. Sehingga penanganan yang dilakukan saat ini hanya melakukan penanganan dengan melakukan upaya penanganan pada saluran drainase jalan yang ada supaya tidak tersumbat untuk mengurangi adanya genangan dengan melakukan kegiatan pembersihan drainase. Pembersihan drainase merupakan bagian pemeliharaan, drainase untuk Bidang Bina Marga pada drainase jalan sebagai penangananan jalan atau badan jalan untuk melindungi struktur konstruksi jalan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh bagian perservasi jalan dan jembatan agar

perkerasan jalan tidak rusak yang disebabkan yang salah satunya genangan yang dapat mengikis struktur perkerasan jalan. Dan untuk bagian pemeliharaan pada bidang Sumber Daya Air pada drainase sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh bagian Operasional dan Pemeliharaan. Namun masih ditemukan drainase yang tersumbat akibat sampah sehingga air yang ada pada drainase ketika hujan tiba meluap kepermukaan jalan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru yang dilakukan di lokasi penelitian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dikategorikan **“Cukup Baik”**. Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni pada kategori cukup baik dengan nilai tertinggi dengan jumlah nilai 33.5 dibandingkan pada kategori baik dengan jumlah nilai 30.6 dan pada kategori kurang baik dengan jumlah nilai 2. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sehingga masih ditemukan titik banjir pada drainase jalan yaitu perkembangan dan pertumbuhan perkotaan yang begitu pesat yang menimbulkan drainase yang ada mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi dengan baik yang salah satunya adanya drainase yang tersumbat. Sehingga masih ditemukan titik-titik banjir pada drainase jalan seperti hasil pengamatan peneliti temukan:

1. Di JL.HR. Soebrantas sebagai tempat langganan genangan air atau banjir timbul karna saluran drainasenya adanya penumpukan sampah atau sedimen yang mengendap dan mengapung sehingga drainase itu tersumbat

yang dapat mengganggu pengendara yang melintas dan jika hujan deras atau intensitas yang cukup lama genangan dapat masuk ke dalam bangunan ruko sekitaran daerah tersebut. Masyarakat sekitar simpang jalan kutilang sakti menuju simpang lampu merah Tabek Gadang pernah terjadi ketika hujan tiba sekitar 1-2 jam-an sudah tergenang atau air yang ada pada drainase itu sudah meluap yang lamanya genangan sekitar 6 jam-an sudah masuk keruko apalagi ketika intensitas hujan tinggi atau lama tingginya bisa mencapai dengkul.

2. Jl. Lobak timbul genangan air atau banjir karna besarnya aliran air ketika hujan tiba dan masyarakat menilai bangunan drainase depan MTS didekat aliran air yaitu memperkecil badan sungai. sehingga ketika hujan tiba sebentar saja sekitar 1 jam-an saja sudah tergenang atau drainase yang ada itu sudah meluap kepermukaan jalan yang lamanya genangan sekitar 6 jam-an
3. Jl..Srikandi timbul genangan air atau banjir karna intensitas hujan yang lama sehingga air meluap kepermukaan jalan dan masyarakat menilai perlu menambah penyangga pada bagian dikiri dan kanan bangunan jalan yang berada di sebelah kiri JL.Srikandi tersebut pada aliran sungai. Pada pernyataan masyarakat pada JL.Srikandi tahun lalu ada kejadian daerah aliran air disitu mobil terseret akibat hujan lebat air yang ada pada saluran air sungai itu meluap ke permukaan jalan.

4. Jl. Sukakarya adanya drainase yang roboh dan timbul genangan air karna banyaknya drainase yang tertumpuk sampah dan banyaknya bangunan masyarakat yang belum memiliki drainase.
5. Jl. Garuda Sakti timbul genangan karna masih adanya tumpukan sampah. Hal ini membuat drainase tersumbat yang mengakibatkan tidak bisa menampung dan mengalirkan aliran air hujan tiba yang dapat meluap ke permukaan jalan dan menimbulkan adanya banjir.

Tabel V.XVII : Rekapitulasi Responden Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru dari hasil penelitian berjudul Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan	3 (15%)	13 (65%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Perataan	2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	20 (100%)
3	Responsivitas	4 (20%)	10 (50%)	6 (30%)	20 (100%)
4	Ketepatan	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		12	48	20	80
Rata-Rata		3	12	5	20
Persentase		15%	60%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Masyarakat Kota Pekanbaru terkait Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru dari rekapitulasi data diaatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden pada kategori “Baik” rata-rata responden 3 atau jika dipersentasekan sebesar 15%, kategori “Cukup Baik” diketahui rata-rata responden 12 atau jika

dipersentasekan sebesar 60%, kategori “Kurang Baik” diketahui rata-ratanya 5 atau jika dipersentasekan sebesar 25%.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.XVIII pada indikator Kecukupan responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 3 atau jika dipersentasekan sebesar 15%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 13 atau jika dipersentasekan sebesar 65%, kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 4 atau jika dipersentasekan sebesar 20%. Kemudian pada indikator Perataan responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 2 atau jika dipersentasekan sebesar 10%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 13 atau jika dipersentasekan sebesar 65%, kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 5 atau jika dipersentasekan sebesar 25%. Kemudian pada indikator Responsivitas responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 4 atau jika dipersentasekan sebesar 20%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 10 atau jika dipersentasekan sebesar 50%, kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 6 atau jika dipersentasekan sebesar 30%. Kemudian pada indikator Ketepatan responden responden memberikan jawaban kategori “Baik” dengan rata-rata 3 atau jika dipersentasekan sebesar 15%, kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 12 atau jika dipersentasekan sebesar 60%. kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata 5 atau jika dipersentasekan sebesar 25%.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru yang dilakukan di lokasi penelitian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dikategorikan **“Cukup Baik”**.

Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni pada kategori cukup baik dengan nilai tertinggi dengan jumlah nilai 48 dibandingkan pada kategori baik dengan jumlah nilai 12 dan pada kategori kurang baik dengan jumlah nilai 5. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sehingga masih ditemukan titik banjir dan masyarakat tidak secara keseluruhan mengetahui Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase di Kota Pekanbaru pada indikator Efektivitas dan Efisiensi. Pada indikator Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan ketepatan dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan pada unsur masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah cukup baik pelaksanaannya dalam menangani banjir atau genangan air saat kejadian banjir yang cukup tinggi dan masyarakat menilai kegiatannya belum sepenuhnya dilakukan secara merata hanya pengerjaan pada saluran drainase yang menjadi penyebab banjir itu belum dilakukan secara menyeluruh disekitar atau disepanjang drainase jalan yang dekat timbulnya genangan air atau banjir dengan melakukan pembersihan drainase yang tersumbat yang dilakukan oleh tim baju warna kuning atau tim kuning Dinas Pekerjaan Umum dengan melakukan pengerukan dan pengangkutan sampah pada saluran drainase yang penyebabnya itu pada drainase jalan sering timbul karna salah satunya adanya sampah yang menyangkut atau tersumbat sehingga hujan tiba maka air yang ada di drainase meluap kepermukaan jalan yang mengganggu pengguna jalan yang melintas dan apalagi hujan yang cukup lama bahkan bisa masuk sampai keruko atau kedai.

C. Faktor-Faktor Penghambat Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Drainase Di Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala oleh Pihak Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator efektivitas, terdapat hambatan dalam mengatasi banjir atau genangan air pada drainase yang ada yaitu diperlukan DED (Detail Engginerring Design) Drainase yang komprehensif sebagai penanganan banjir di kota pekanbaru atau rencana teknik detail drainase perkotaan yang dilakukan saat ini masih tahap penyusunan masterplan atau rencana induk sehingga masih adanya titik-titik banjir dan adanya drainase yang tersumbat.
2. Dilihat dari indikator Efisiensi, terdapat hambatan yaitu penanganan yang dilakukan hanya jangka pendek yaitu pada drainase yang tersumbat dengan cara memaksimalkan pembersihan-pembersihan pada drainase yang ada, namun anggaran yang terbatas untuk skala kota Pekanbaru yang dapat memperlambat proses pembersihan drainase secara merata atau secara keseluruhan dan masih adanya masyarakat yang menutup drainase jalan sehingga air yang meluap ke permukaan jalan.
3. Kecukupan bahwasanya bangunan saluran drainase yang ada cukup untuk penanganan jalan namun masih terdapat bangunan drainase yang ada terdapat bangunan drainase yang ada masih ditemui adanya sampah yang tersumbat didalam saluran drainase , adanya beberapa kerusakan struktur seperti dinding drainase yang roboh, serta tingginya endapan sedimen

disalurannya. Dan masih adanya saluran drainase di sekitar masyarakat yang tertumpuk sampah yang menimbulkan aliran airnya menjadi tersumbat sehingga perlu penanganan lebih baik lagi pada bangunan drainase itu berfungsi dengan baik agar tidak meluap kepermukaan jalan. serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat drainase yang ada.

4. Perataan dalam hal ini terdapat hambatan yaitu dalam melakukan Pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan dengan pembersihan-pemberrshian saluran drainase agar drainase yang ada tidak tersumbat oleh adanya sampah dan adanya drainase masyarakat yang tertutup oleh jalan masuk bangunan aliran airnya yang tertutup sehingga penanganan belum bersifat merata atau menyeluruh, karna adanya faktor penghambat seperti anggaran yang terbatas sehingga upaya perawatan dan pemeliharaan dilakukan tergantung anggaran yang tersedia dan tingkat urgennya serta masih adanya pada saluran adanya sedimen/sampah yang mampet. Dan masih adanya masyarakat yang belum memiliki drainase dan diperlukan perencanaan detail sebagai pedoman penanganan banjir.
5. Responsivitas bahwasanya soasialisasi yang dilakukan tidak ada yang bersifat langsung kepada masyarakat namun pihaknya dinas mengatakan laporan yang masuk akan diterima, diprogramkan dan ditindaklanjuti.
6. Ketepatan bahwasanya berkaitan dengan kinerja pihak Dinas belum sepenuhnya tercapai dalam mengatasi banjir atau genangan yang terjadi karna masih adanya titik genangan air/banjir yang terjadi ketika intensitas

hujan yang besar dan ditemui adanya drainase yang tersumbat atau mampet sehingga aliran air pada drainase yang ada meluap ke permukaan jalan yang akibatnya mengganggu pengguna jalan dan jika hujan cukup lama bisa masuk ke ruko atau kedai. Hal ini juga karna adanya faktor penghambat yang disebabkan oleh anggaran dan tenaga kerja yang terbatas sehinga memperlambat proses pengerjaan perbaikan atau belum bisa dijalankan secara menyeluruh dan belum selesainya atau masih menyusun masterpan drainase atau rencana induk yang lengkap sebagai pedoman dasar dalam penanganan banjir serta minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat drainase yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

7. Dari hasil penelitian pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab diatas berdasarkan analisis yang penulis lakukan dilapangan pada masing-masing indikatornya, dan yang dilakukan dilapangan serta pengamatan di lokasi penelitian dengan melalui tahapan yaitu pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner, wawancara dengan key informan di lokasi penelitian dan observasi yang dilakukan di lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan berada pada kategori “Cukup Baik”. hal ini karna seiiring perkembangan perkotaan yang begitu pesat dan kota pekanbaru sudah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang banyak dan meningkatnya pembangunan yang didirikan untuk itu perlu penanganan untuk mengatasinya agar tidak terjadi genangan air yang berlebihan. Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru melakukan upaya penanganan drainase yang ada agar tidak tersumbat dengan melakukan pembersihan-pembersihan pada drainase yang ada hal ini bertujuan agar aliran air pada drainase lancar atau tidak mampet. Drainase pada bidang bina marga sebagai penanganan badan jalan, karna genangan air sebagai salah satu penyebab kontruksi jalan atau badan jalan berlobang yang dilaksanakan oleh bagian perservasi jalan dan jembatan. Dan pembersihan merupakan bagian dari pemeliharaan drainase sebagai

pengendali banjir itu dilakukan pada bidang Sumber daya air dilaksanakan oleh bagian operasional dan pemeliharaan. Namun pembersihan yang dilakukan dilakukan berdasarkan tingkat urgennya yang sifatnya incidental yaitu dilakukan belum secara tetap atau rutin hanya saat kejadian mendesak sehingga masih ditemukan drainase yang tersumbat dari sedimen yang mengendap atau sampah akibatnya ketika hujan tiba air meluap kepermukaan jalan yang dapat mengganggu pengendara yang melintas.

8. Adapun faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala oleh Pihak Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, yang berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya dan keterangan yang didapatkan oleh responden saat sesi wawancara tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota pekanbaru pada segi anggaran yang terbatas, yang dapat memperlambat proses pemeliharaan atau perbaikan drainase secara merata. Selanjutnya adalah belum selesainya DED (Detai Engginerring Design) atau masterplan (rencana induk) sebagai pedoman dasar penanganan banjir di kota pekanbaru masih tahap penyusunan, sehingga penanganan yang dilakukan hanya penanganan jangka pendek yaitu melakukan pembersihan drainase yang ada agar tidak tersumbat agar alirannya lancar. Serta Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tenaga kerja yang terbatas sehingga menimbulkan dampak memperlambat proses pengerjaan atau tidak bisa dijalankan secara menyeluruh. Dan selanjutnya kepedulian masyarakat yang kurang untuk menjaga dan merawat drainase yang ada dan masih

adanya bangunan yang tidak memiliki drainase yang berdampak adanya genangan air di permukaan jalan, karna drainase itu sendiri berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air yang ada ketika hujan tiba.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan diatas maka dari hasil penelitian tersebut peneliti memberi saran sebagai masukan kepada Pihak-pihak yang terlibat yaitu :

1. Perlunya kordinasi antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru dengan dinas permahan rakyat dan kawasan permukiman untuk menghubungkan drainase yang ada sekitar jalan dengan drainase yang ada di hunian dan kawasan perumahan dan dengan dinas lainnya yang ada di kota Pekanbaru.
2. Perlu mengusulkan jumlah personil dari Sumber Daya Manusianya sebanding dengan pelaksanaan mengenai persoalan perbaikan drainase sehingga dapat mempermudah dalam proses pengerjaan agar terlaksana secara merata.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan untuk memenuhi syarat izin mendirikan bangunan seperti harus memiliki saluran drainase agar aliran yang ada dapat tersambung dan air yang ada tidak meluap ke permukaan jalan. Serta perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri dan ikut serta untuk untuk pentingnya menjaga kebersihan yang ada yang dimulai dengan daerah lingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, penerbit:Alfabeta, Bandung
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Medi Group.Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gasperz, Vincent. 2007. *Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Public*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Moekijat, 1998. *Prilaku Organisasi*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- _____, Taliziduhu.2011. *kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nirmala, Andini T, 2003.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media Surabaya
- Nugroho, D, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Rasyid, M.R. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Siagan, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah 2010, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media Group
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Zulkifli, dkk, 2013 *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP) Skripsi Dan Kertas Kerja*, Badan Penerbit Fisipol UIR, Pekanbaru.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 19 tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru